

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAERAH

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2016, merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari masa jabatan pasangan Drs. H. M. BAMBANG SUKARNO dan IRAWAN PRASETYADI, S.Si, M.Par. Pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2016 mempunyai nilai strategis karena dari capaian kinerja di Tahun 2016 dapat dipetakan target yang dapat/ telah tercapai, target yang akan tercapai, dan target yang perlu upaya keras dari capaian kinerja yang menjadi target akhir pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.



Berdasarkan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diamanatkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja tahunan perangkat daerah yang telah disusun, dalam menyusun laporan kinerja diperlukan instrumen untuk mengukur keberhasilan dari suatu organisasi dalam mencapai sasaran strategis menuju perwujudan visi dan misi organisasi tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu instrumen dari SAKIP merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Berdasarkan pelaporan kinerja tersebut, masing-masing unit kerja dapat melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan instansi pemerintah melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan Pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada instansi yang lebih tinggi.

Salah satu program area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah yang diarahkan agar setiap instansi pemerintah dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan

kinerjanya secara akuntabel dan lebih baik, melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) secara sistematis.

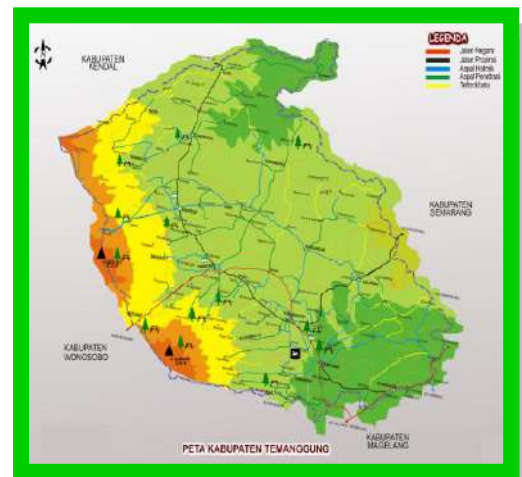
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2016 merupakan laporan kinerja tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2013-2018. Penyusunan LKjIP dimaksud adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan.

B. ASPEK STRATEGIS

1. ASPEK GEOGRAFIS DAERAH

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 87.065 Ha. Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 139 Lingkungan, 1.610 Rukun Warga, dan 5.553 Rukun Tetangga dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung.

Kabupaten Temanggung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah secara rinci terlihat pada Tabel 1.1.



Gambar 1.1 Peta Kab. Temanggung

Tabel 1.1
Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2016

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candiroti
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Dari kondisi di atas maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Temanggung dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan harus memperhatikan

kondisi daerah-daerah yang terletak di perbatasan wilayah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan penanganan daerah perbatasan memerlukan pencermatan lebih karena harus bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi batas wilayah serta bersinergi dengan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Kondisi Topografi

Kabupaten Temanggung memiliki topografi yang kompleks dan beranekaragam sesuai dengan tipikal wilayah yang dikelilingi oleh gunung dan pegunungan. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0 % - 70 % (datar sampai dengan sangat curam).

Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan, tergambaran melalui Tabel 1.2.

Tabel 1.2
**Pembagian Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan
Kabupaten Temanggung
Tahun 2015**

No	Jenis/Kelas Kemiringan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Datar (0 - 2 %)	968	1,17
2.	Bergelombang (2 - 15 %)	32.492	39,31
3.	Curam (15 - 40 %)	31.232	37,88
4.	Sangat Curam (> 40 %)	17.983	21,64
Jumlah		82.675	100

Sumber : Buku Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 1.2, maka topografi dan kemiringan wilayah Kabupaten Temanggung memiliki permukaan yang sangat beragam dengan persentase terbesar berupa permukaan bergelombang yang mencakup 39,31 % dan terkecil berupa permukaan datar yang hanya 1,17 %.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500 -1.450 m dpl, wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara.

2. ASPEK DEMOGRAFI DAERAH

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2016 tercatat sebanyak 803.745 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 923 jiwa/km² dan persebaran penduduk relatif merata. Adapun data sebaran penduduk menurut luas wilayah dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan Tahun 2016 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah, Sebaran, dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Temanggung Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Parakan	55.096	22.23	2.478
2.	Kledung	28.343	32.21	880
3.	Bansari	24.265	22.53	1.077
4.	Bulu	48.932	43.04	1.137
5.	Temanggung	83.920	33.39	2.513
6.	Tlogomulyo	23.177	24.84	933
7.	Tembarak	31.479	26.84	1.173
8.	Selopampang	20.426	17.29	1.181
9.	Kranggan	49.625	57.61	861
10.	Pringsurat	52.315	57.27	913
11.	Kaloran	46.746	63.92	731
12.	Kandangan	52.706	78.36	672
13.	Kedu	61.171	34.96	1.749
14.	Ngadirejo	57.115	53.31	1.071
15.	Jumo	30.503	29.32	1.040
16.	Gemawang	34.209	67.11	509
17.	Candiroto	33.481	59.94	558
18.	Bejen	21.908	68.84	318
19.	Tretep	21.356	33.65	634
20.	Wonoboyo	26.972	43.98	613
Jumlah Total		803.745	870,65	923

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari Tabel 1.3 pada Tahun 2016 jumlah penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan Temanggung sebesar 83.920 jiwa dengan kepadatan 2.513 jiwa/km² dan paling sedikit di Kecamatan Selopampang sebesar 20.426 jiwa dengan kepadatan 1.071 jiwa/km², namun kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Bejen dengan kepadatan 318 jiwa/km².

3. ASPEK EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2010- 2015 dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4.
**Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung
 Tahun 2010-2015**

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010)	
	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %
2010	9.710.199,27	-	9.710.199,27	-
2011	10.870.286,37	11,95	10.301.569,79	6,09
2012	11.841.494,84	8,93	10.740.983,02	4,27
2013	13.088.402,25	10,53	11.299.342,97	5,20
2014	14.589.940,04	11,47	11.870.605,08	5,06
2015	16.092.983,81	10,30	12.484.288,20	5,17

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Pada tahun 2015 besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Temanggung secara agregat mencapai 16.092.983,81 juta rupiah. Dengan angka sebesar itu menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan PDRB pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 10,30 %.

Pertumbuhan PDRB adhb sebesar 10,30 % tersebut sebenarnya belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sebagaimana ditunjukkan dengan PDRB adhk (telah menghilangkan faktor inflasi) pada Tahun 2015 berada di angka 5,17 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,06.

Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2016 diperkirakan berada pada angka 5,06, menurun jika dibandingkan Tahun 2015 yang mencapai 5,17. Hal ini seiring dengan gagalnya musim panen Tembakau karena musim yang tidak mendukung, kegagalan panen Tembakau tersebut disertai pula dengan harga yang tidak menggembirakan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan sejak tahun 2008 yang lalu. Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 Asisten dan 10 Bagian yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SETWAN, Dinas Daerah, BAPPEDA, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Setda mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas SETWAN, Dinas Daerah, BAPPEDA, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 Asisten dan 10 Bagian;

1. Asisten Pemerintahan, membawahi 4 Bagian, yaitu: Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, dan Bagian Humas.
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 Bagian, yaitu: Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, dan Bagian Kesra.
3. Asisten Administrasi, membawahi 3 Bagian yaitu: Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Tatalaksana, serta Bagian Sandi, Telekomunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik.

2. SEKRETARIAT DPRD

SETWAN mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SETWAN menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. DINAS DAERAH

Dinas Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan bidangnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Daerah; sejumlah 12 Dinas, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

4. LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya
4. penyelenggaraan kesekretariatan
5. pelaksanaan pelayanan penunjang
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Badan, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah sejumlah 9 SKPD, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi, Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, dan Kantor Ketahanan Pangan.

5. KECAMATAN

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas:

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
2. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
4. pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
5. penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
6. penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
7. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kabupaten Temanggung memiliki 20 Kecamatan.

6. KELURAHAN

Tugas Pokok dan Fungsi Lurah adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pelayanan masyarakat
3. pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemberdayaan masyarakat;
6. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat

Kabupaten Temanggung memiliki 23 Kelurahan

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan pada akhir Tahun 2016 yang lalu.

Namun organisasi pemerintahan yang terbentuk tersebut, dinyatakan mulai efektif sejak awal 2017 sehingga sampai akhir 2016 masih menggunakan perangkat daerah lama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

D. KEPEGAWAIAN

Profil PNS di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2016 menurut golongan dan eselon, pejabat fungsional dan pensiunan PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5.

Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung

NO	JENIS DATA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Jumlah PNS	9.155	8.937	8.608	8.266	7.993	8.156	7.277
	1. Golongan I	466	460	453	454	433	418	373
	2. Golongan II	2.377	2.345	2.046	1.753	1.489	1.519	1.322
	3. Golongan III	3.349	3.349	3.090	3.076	3.200	3.485	3.262
	4. Golongan IV	2.963	2.783	3.019	2.981	2.871	2.734	2.320

II.	Jumlah Pejabat Struktural	801	829	833	801	779	847	763
	1. Eselon I	0	0	0	0	0	0	0
	2. Eselon II	26	23	24	21	22	25	25
	3. Eselon III	143	145	149	142	141	150	136
	4. Eselon IV	586	615	613	589	567	620	566
	5. Eselon V	46	46	47	49	49	52	52
III.	Jml Pejabat Fungsional	5.841	5.294	5.302	5.278	5.067	5.088	4.334
IV.	Jumlah Pensiunan PNS	307	325	331	385	260	260	280

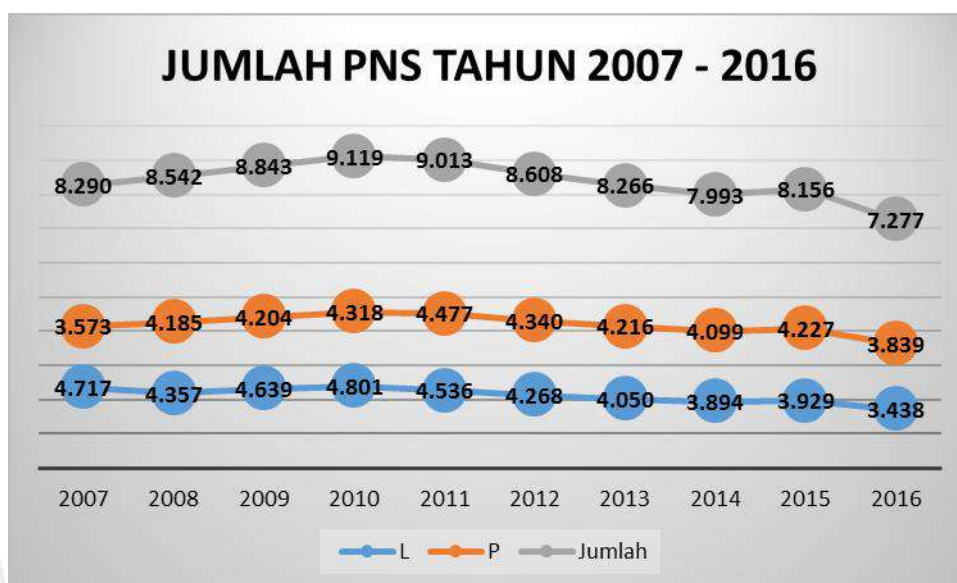
Sumber : BKD Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai keadaan pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Temanggung yang telah dibuat sejak tahun 2005.

Gambar 1.2. sistem informasi kepegawaian



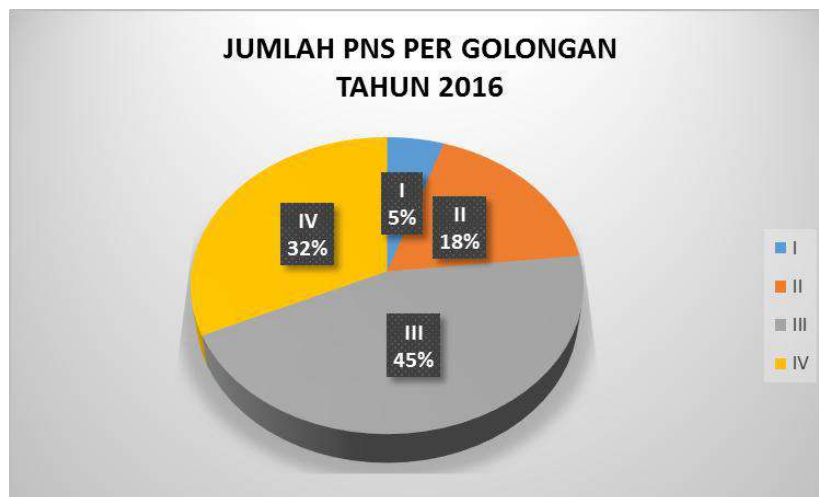
Tabel 1.6.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung
Tahun 2007 – 2016



Berdasarkan tabel 1.6, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2016 merupakan tahun dimana jumlah PNS di kabupaten Temanggung berada di angka terendah.

Tabel 1.7.

Jumlah PNS Per Golongan di Kabupaten Temanggung



Dari tabel 1.7 tersebut, dapat diketahui bahwa pegawai negeri sipil dengan golongan III memiliki jumlah terbanyak yaitu 45 % dari total pegawai yang ada.

Tabel 1.8.

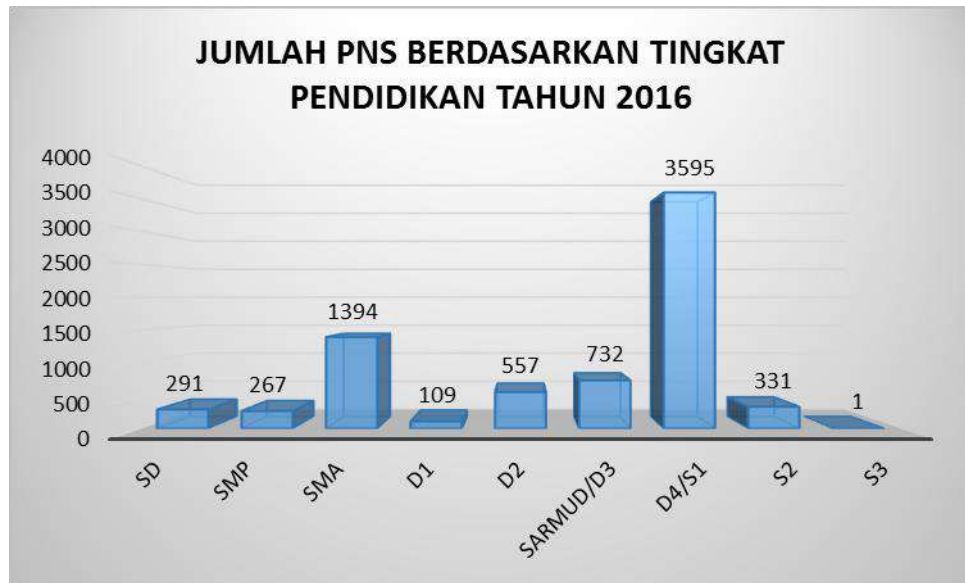
Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Temanggung



Berdasarkan tabel 1.8, dapat dilihat bahwa jabatan eselon IV.a memiliki jumlah terbanyak 440 pejabat jika dibandingkan dengan jabatan yang lain.

Tabel 1.9.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dari Tabel 1.9, dapat diketahui jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan S.I dan D-IV memiliki jumlah terbanyak yaitu 3.595 pegawai.

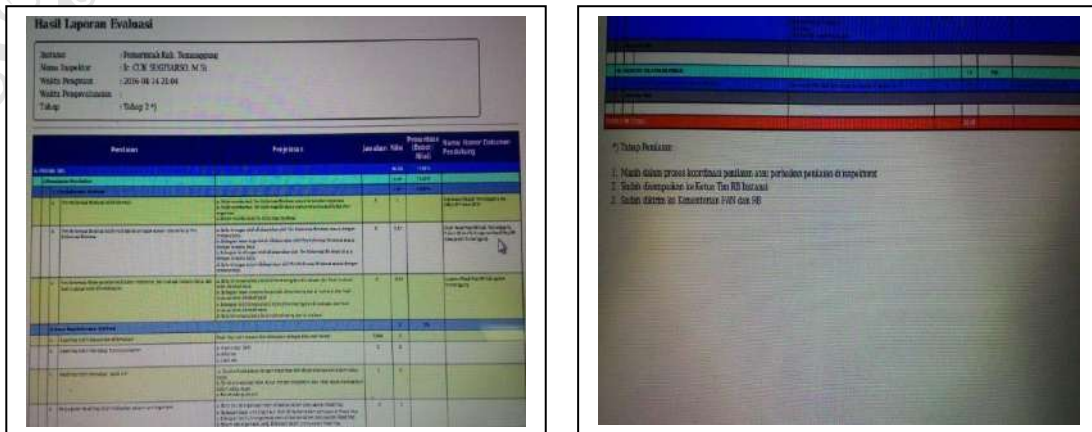
E. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

PMPRB sendiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam form ini penilaian dilaksanakan pada 8 area perubahan dengan kriteria penilaian sesuai dengan sistem.

Berdasarkan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2016, pemenuhan target indikator internal yang mencerminkan pencapaian program dan kegiatan RB Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah 66,68 %. Jika dibandingkan dengan penilaian tahun 2015, telah mengalami kenaikan cukup banyak, dimana pada tahun 2015 PMPRB Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai 59,18 %.

Untuk target pencapaian PMPRB ini memang belum sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Temanggung berharap di tahun 2017 ini ada perkembangan lebih baik mengenai pelaksanaan Refomasi Birokrasi.

Gambar 1.3. Sistem Penilaian PMPRB



F. ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok per urusan pemerintahan daerah dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2013-2018 adalah:

1. Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
3. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
4. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan
6. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
8. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
9. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah;

10. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
11. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaan lingkungan hidup;
12. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan yang didukung dengan pelaksanaan *e-Government*;
13. Belum optimalnya pelayanan publik.

Isu-isu strategis yang merupakan hasil pengelompokan atas identifikasi permasalahan pokok pada masing-masing urusan pemerintahan daerah akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan umum pembangunan daerah dan prioritas dalam menetapkan program kegiatan.

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian LKjIP Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan laporan kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2016 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Pada akhir tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar pelaksanaan reviu RPJMD Kabupaten Temanggung pada tahun 2016. Selanjutnya hasil reviu dimaksud telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018.

Dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 sebagai perwujudan dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan visi daerah yaitu:

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

Guna mewujudkan visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu: **“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”**.

TABEL 2.1
HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

VISI: TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH"				
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Misi Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (NTP)
		Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita Tingkat ketersediaan Protein per Kapita
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Jumlah investasi	Laju investasi
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat pertumbuhan ekonomi
			Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan
2.	Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera	Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera	Menurunnya tingkat pengangguran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Menurunnya angka pengangguran Menurunnya angka kemiskinan
		Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Menurunnya angka kriminalitas
		3.	Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebagai penunjang perekonomian	Meningkatnya kualitas infrastruktur
Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	Persentase minimal bencana yang terselesaikan			
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman untuk mewujudkan rumah yang layak dan terjangkau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Taman/ Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan Kriteria baik

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
		Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan		Persentase pelayanan sampah perkotaan
4.	Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas Meninggalkan Kearifan Lokal	Meningkatkan Budi Pekerti, Tata Krama Nilai Budaya dan Keteladanan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Peresentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
5.	Mewujudkan Peningkatan Budaya dan Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Jaringan, Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Keluarga Meningkatkan Jaringan, Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Prevelensi balita Gizi Buruk (0-60 bulan) Angka Harapan Hidup Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga a. Keluarga Sejahtera III b. Keluarga Sejahtera III plus Laju pertumbuhan penduduk Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
6.	Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Aset Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan public Terwujudnya Pengelolaan e-Government	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Evaluasi kinerja penyeenggaraan pemerintah Daerah Opini pemeriksaan BPK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja utama
Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (NTP)
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita
		Tingkat ketersediaan Protein per Kapita
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Jumlah investasi	Laju investasi
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat pertumbuhan ekonomi
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan
Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera	Menurunnya tingkat pengangguran	Menurunnya angka pengangguran
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Menurunnya angka kemiskinan
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Menurunnya angka kriminalitas
Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebagai penunjang perekonomian	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman
Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana		Persentase minimal bencana yang terselesaikan
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman untuk mewujudkan rumah yang layak dan terjangkau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Taman/ Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan Kriteria baik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja utama
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembengunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan		Persentase pelayanan sampah perkotaan
Meningkatkan Budi Pekerti, Tata Krama Nilai Budaya dan Keteladanan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
		Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Meningkatkan Jaringan, Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
Meningkatkan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat		Prevelensi balita Gizi Buruk (0-60 bulan)
		Angka Harapan Hidup
Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Keluarga	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga	a. Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Sejahtera III
		b. Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Sejahtera III plus
		Laju pertumbuhan penduduk
Meningkatkan Jaringan, Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
		Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah
Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Aset Daerah	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya Pengelolaan e-Government	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2016. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2016 ada pada Lampiran IV.

D. PERJANJIAN KINERJA

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, misi dan visi. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 telah mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	TARGET 2016
1	2	3	4
A. Misi Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern Yang Berwawasan Lingkungan			
1.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (NTP) $\frac{\text{Indeks harga yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks harga yang dibayar petani}}$	101,3
2.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita $100 \times \frac{\text{Ketersediaan pangan per kapita per hari}}{\text{bagian Yang dapat dimakan}} \times \text{kandungan kalori}$	2900 kkal/kap/hr

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2016
1		2	3	4
		Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	$\frac{\text{Ketersediaan pangan per kapita per hari}}{100} \times \text{kandungan kalori} \times \text{bagian yang dapat dimakan}$	74,75 gr/kap/hr
3.	Jumlah investasi	Laju investasi	$\frac{\text{Nilai investasi tahun berjalan} - \text{nilai investasi th sebelumnya}}{\text{nilai investasi th sebelumnya}} \times 100$	14,43 %
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat pertumbuhan ekonomi	$\frac{\text{PDRB harga konstan tahun n dikurangi dengan PDRB tahun n-1}}{\text{PDRB tahun n-1}} \times 100$	5
5.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah wisatawan yang berkunjung per tahun dibandingkan tahun sebelumnya dan data dasar	20 %
B. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera				
6.	Menurunnya tingkat pengangguran	Menurunnya angka pengangguran	$\frac{\text{Jumlah penganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$	4.75%
7.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Menurunnya angka kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Sasaran}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$	13.30%
8.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Menurunnya angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun}}{\text{jumlah penduduk}} \times 10.000$	0,47
C. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan				
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman	$\frac{\text{jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan memenuhi standart rambu lalu lintas}}{\text{panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	76%
		Persentase minimal bencana yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah lokasi bencana terselesaikan}}{\text{Jumlah lokasi bencana}} \times 100 \%$	100%
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Taman/ Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan Kriteria baik	$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah perkotaan Kabupaten Temanggung}} \times 100 \%$	30.25%
		Persentase pelayanan sampah perkotaan	$\frac{\text{Tingkat pengelolaan sampah Kabupaten}}{\text{Jumlah timbulan sampah Kabupaten}} \times 100 \%$	9.80%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2016
1		2	3	4
D. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal				
11.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	$\frac{\text{Jumlah tahun bersekolah individu di atas 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk di atas 15 tahun}} \times 100$	7,15 %
		Peresentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis}}{\text{jumlah penduduk usia di atas 15 tahun}} \times 100$	30%
E. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat				
12.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas selama satu tahun}}{\text{jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama}} \times 100$	101 perkilomil
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah bayi (< 1 tahun) yang meninggal di Kabupaten Temanggung selama satu tahun}}{\text{jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama}} \times 1000$	13 permil
		Prevelensi balita Gizi Buruk (0-60 bulan)	$\frac{\text{Jumlah balita yang berstatus gizi buruk di Kabupaten Temanggung selama satu tahun}}{\text{jumlah balita yang ditimbang pada tahun yang sama}} \times 100$	<0,5 %
		Angka Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang	72,82
13.	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III	$\frac{\text{Jumlah keluarga sejahtera III}}{\text{jumlah seluruh keluarga}} \times 100$	45,23
		Meningkatnya kualitas kesejahteraan Keluarga Sejahtera III plus	$\frac{\text{Jumlah keluarga sejahtera III Plus}}{\text{jumlah seluruh keluarga}} \times 100$	3,98
		Laju pertumbuhan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk th n} - \text{jumlah penduduk (tahun n-1)}}{\text{jumlah penduduk (tahun n-1)}} \times 100$	0,63 %
14.	Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien penduduk miskin yang dilayani (JKT) selama 1 tahun (lama dan baru)}}{\text{Jumlah seluruh penduduk miskin sakit yang tidak ditanggung Jamkesmas}} \times 100$	100%

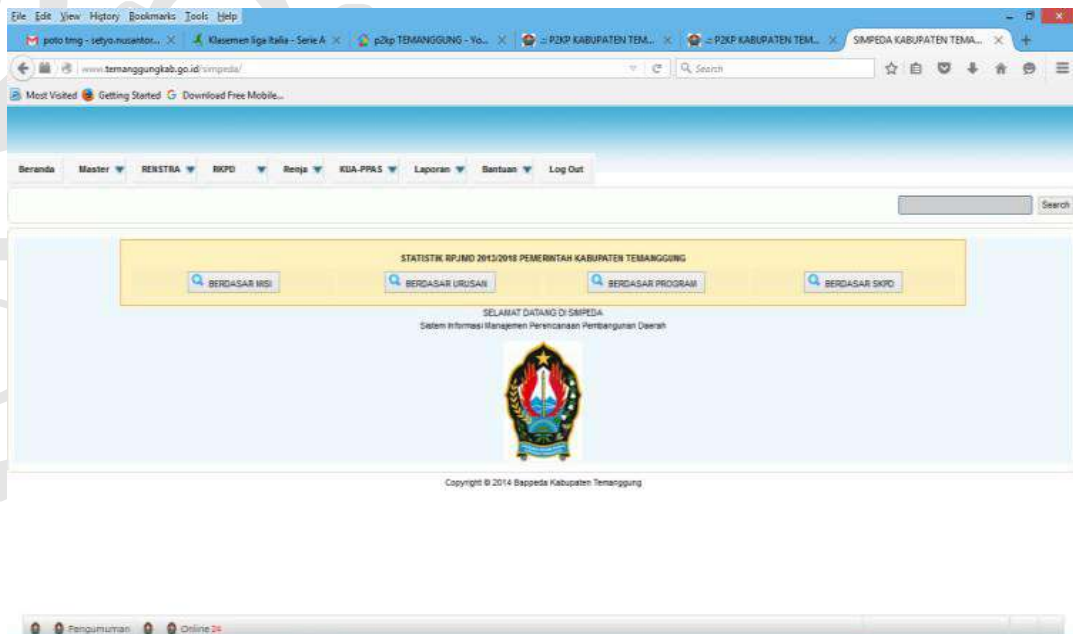
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2016
1		2	3	4
F. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik				
15.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	B
		Nilai Evaluasi kinerja penyelesaian pemerintahan Daerah	Hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri	sangat baik
16.	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK	Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah SKPD dengan IKM B (75) atau lebih dibandingkan dengan seluruh SKPD	75
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani pada tahun (x) x 100%. jumlah pengaduan masyarakat yang ada pada thn (x)	100%
18.	Terwujudnya Pengelolaan e-Government	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	Jumlah Sistem Informasi e-Government yang tersedia x 100 jumlah organisasi perangkat daerah	55 %

E. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada SKPD yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



Gambar 2.1 Sistem perencanaan daerah

2. **SIAK** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan pada masing-masing SKPD sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.



Gambar 2.2 Sistem informasi Akuntansi daerah

3. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh SKPD. Setiap SKPD wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



Gambar 2.3 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2016 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2016 sebagai pelaksanaan amanah yang diemban oleh Pemerintah Daerah. Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah di masa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis (RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018).

A. Pengukuran

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013 –2018 Kabupaten Temanggung.

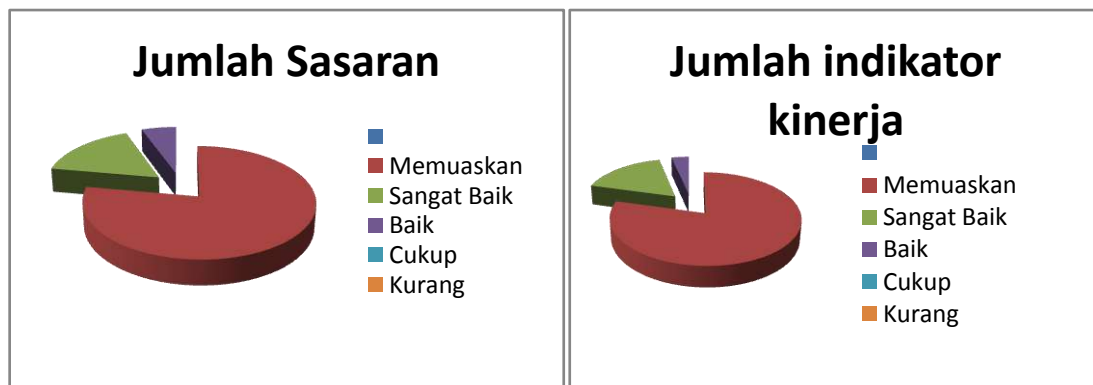
Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2016. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2016, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 3.

Pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016, sesuai dengan dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak 18 (delapan belas) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung memiliki 18 sasaran strategis dan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja yang terdiri dari 6 indikator untuk misi I, 3 indikator untuk misi II, 4 indikator untuk misi III, 2 indikator untuk misi IV, 8 indikator untuk misi V, dan 6 indikator pada misi VI.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 secara umum disajikan pada grafik 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Sasaran dan Indikator



Dari table di atas dapat dilihat bahwa 29 indikator yang diukur, sebanyak 14 indikator (48,27%) memuaskan, sebanyak 13 indikator (44,8 %) sangat baik, 1 indikator (3,3%) baik dan 1 indikator (3,3%) kurang. Indikator yang masih dibawah target yaitu:

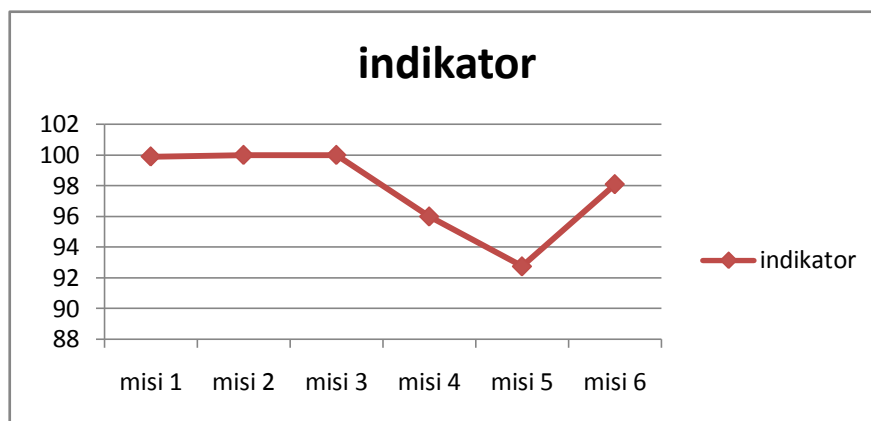
1. Nilai Tukar Petani (NTP) dengan capaian 99,7%
2. Rata-rata Lama Sekolah dengan capaian 91,47%
3. Persentase Angka Melek Huruf Usia \geq 15 tahun dengan capaian 99,74%
4. Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III Plus dengan capaian 90,45%
5. Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian 44,4 %
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan capaian 85 %

Pencapaian kinerja sasaran pada Misi 1 (Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern Yang Berwawasan Lingkungan) tercapai 109,7 atau memuaskan, pencapaian kinerja pada misi 2 (Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera) sebesar 138,6

atau memuaskan, pencapaian kinerja pada misi 3 (Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan) sebesar 107% atau memuaskan, pencapaian kinerja pada misi 4 (Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal) sangat baik atau sebesar 95,4 %, pencapaian pada misi 5 (Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat) sebesar 96,85 atau kategori sangat baik, pencapaian pada misi 6 (Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik) sebesar 98,1 atau sangat baik. Untuk meminimalisir kurang maksimalnya capaian sasaran, kedepan semua OPD wajib melaporkan perkembangan program dan kegiatan setiap 3 bulan sekali.

Tabel 3.2

Pencapaian Misi



Dari table di atas data di ketahui bahwa rata-rata nilai capaian kinerja pada misi 1 sampai dengan misi 6 adalah 97,7 atau kategori sangat baik.

Penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang meliputi RPJMD, Renstra, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reuiu dan evaluasi kinerja berdasarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :



Tabel 3.3

**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian > 100,00%	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 100,00%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

B. Capaian Kinerja

Misi Satu Mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan.

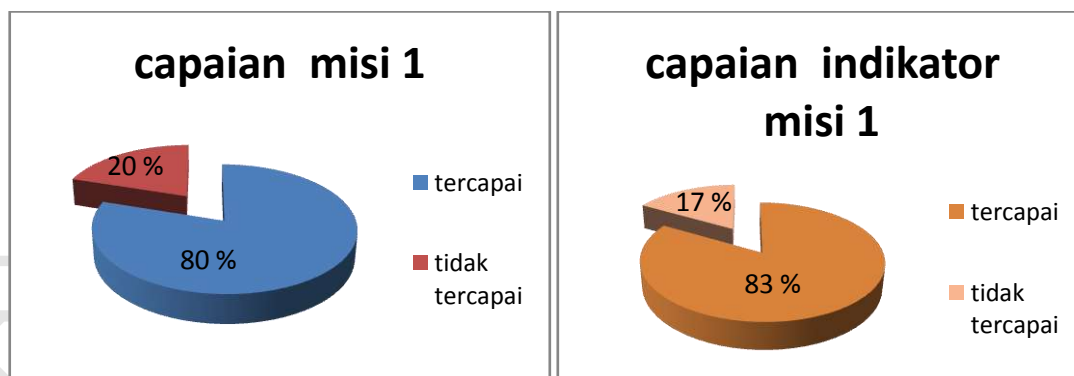
Pada misi I yaitu **mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan** terdapat 5 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani dengan nilai capaian 100%
2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
3. Meningkatnya jumlah investasi
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
5. Meningkatnya kunjungan wisatawan

Pencapaian sasaran dan indikator pada misi mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Misi I



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 5 sasaran yang terdapat pada misi I, 80 % (4 sasaran) dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan 20 % (1 sasaran) belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk indikator pada misi I ini terdapat 6 indikator kinerja dimana 83% (5 indikator) telah tercapai target, sedangkan 17% (1 indikator) telah dilaksanakan, tetapi belum dapat terealisasi sesuai dengan target. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi I adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada satu indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 1

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kesejahteraan petani											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	R	CK	TK	RK	CK	
1.	Nilai Tukar Petani	101	101,5	100	101,1	101,2	100	101,3	101,27	99,97	101,5
Rata-rata capaian sasaran		100			100			99,97			

Ket. : TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja *) Angka Sementara

- ❖ Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dikeluarkan petani, meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, perikanan dan peternakan. Dalam perhitungannya NTP juga melibatkan kalkulasi pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan, pendidikan, perumahan, rekreasi, olahraga, transportasi dan komunikasi.
- ❖ NTP yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menggambarkan nilai tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.
- ❖ Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2016 sebesar 99,97% dari target yang ditetapkan (101,3%). NTP tahun 2016 meningkat 0,26% jika dibanding tahun 2015, dan turun 3% dibanding tahun 2014. Hal ini disebabkan karena adanya fluktuasi harga yang cukup tajam terutama komoditas hortikultura (cabai merah, bawang merah) dan perkebunan (tembakau). Sehingga mempengaruhi indeks harga yang diterima petani, sedangkan untuk indeks harga yang dibayarkan petani cenderung tidak mengalami kenaikan.

- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani adalah sebesar Rp. 19.457.243.716,- atau 96,56 % dari total pagu sebesar Rp. 19.457.243.716,-. Dengan capaian rata-rata yang mencapai 99,97% dan capaian realisasi keuangan yang mencapai 96,58% maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.
- ❖ Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh keberhasilan Program berikut ini:
 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan
 - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - Program pemberdayaan petani
 - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 - Program rehabilitasi hutan dan lahan
 - Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
 - Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
 - Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- ❖ Apabila seluruh program meningkatnya kesejahteraan petani dilaksanakan secara konsisten, diperkirakan angka kemiskinan akan tercapai sesuai dengan target akhir RPJMD sebesar 101,5%. Meskipun dapat dipastikan bahwa target di akhir tahun RPJMD akan tercapai, tetapi tetap perlu kerjasama seluruh stakeholder.

2. Sasaran strategis Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 2

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	R	CK	TK	RK	CK	
1.	Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita	2.800	2.716,59	100	2.850	2.833	99,4	2.900	3.020	104,1	2.980
2.	Cakupan Ketersediaan protein per Kapita	73,54	134,08	100	74,00	150,4	100	74,75	100,6	134,5	75,99
Rata-rata capaian sasaran				100			98,18			119,3	

Ket. : TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah tahun 2016 telah tercapai 100%, atau meningkat 0,6% jika dibanding tahun 2015. Sasaran ini dicapai dengan indikator Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita dan Cakupan Ketersediaan protein per Kapita.

Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 2.200 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah 2.000 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku.

Protein merupakan komponen bahan pangan yang berfungsi sebagai zat pembangun. Protein berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Produksi daging baik dari ternak besar seperti sapi, ternak kecil dan unggas, telur, dan susu menjadi sumber utama ketersediaan protein hewani. Sedangkan protein nabati sebagian besar berasal dari tanaman polong/kacang-kacangan, kelapa, dan buah/biji berminyak. Kedua komponen tersebut mendukung tercapainya cakupan ketersediaan protein sebesar 100.60 gr/kap/hr dimana target akhir renstra adalah 75.99 gr/kap/hari sehingga capaian kinerja untuk indikator cakupan ketersediaan protein per kapita telah tercapai 100% sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak perkapita
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2016

No.	Jenis Bahan Makanan	Ketersediaan Per Kapita											
		2013			2014			2015			2016		
		Energi	Protein	Lemak	Energi	Energi	Energi	Energi	Protein	Lemak	Energi	Protein	Lemak
		(kkal/hr)	(gr/hr)	(gr/hr)	(kkal/hr)	(gr/hr)	(gr/hr)	(kkal/hr)	(gr/hr)	(gr/hr)	(kkal/hr)	(gr/hr)	(gr/hr)
1	Padi-padian	2.239	55,05	17,70	2244	54,99	17,11	2.218	53,86	15,28	2453	59,81	17,72
2	Makanan Berpati	230	1,53	0,77	199	1,34	0,77	201	1,36	0,80	19	0,18	0,45
3	Gula	-	-	-	-	-	-						
4	Buah Biji Berminyak	27	0,73	2,59	21	0,39	1,99	11	0,53	1,02	15	0,82	1,42
5	Buah-buahan	38,19	0,40	0,23	38	0,39	0,23	33	0,35	0,37	1	0,01	0,02
6	Sayur-sayuran	104	4,78	0,95	99	4,50	1,03	142	6,57	1,19	123	11,19	1,21
7	Daging	21	1,51	1,64	61	4,12	48,5	44	3,01	3,47	337	26,22	25,07
8	Telur	39	3,06	2,80	2,8	2,10	2	28	2,10	2,00	27	2,09	1,98
9	Susu	2	0,09	0,09	1	0,07	0,07	0	0,02	0,03	0	0,02	0,02
10	Ikan	1	0,11	0,01	4	0,84	0,06	9	1,78	0,16	1	0,19	0,01
11	Minyak dan lemak	23	0,02	2,54	22	0,02	2,44	4	0,00	0,048	40	0,07	4,44
	Jumlah	2.723	67,29	29,32	2716	68,75	30,58	2.691	69,58	24,79	3.020	100,6	52,64

- ❖ Upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi, serta mekanisasi pertanian menjadi pendorong utama peningkatan produksi pangan, yang memacu jumlah produksi pertanian tanaman pangan sebagai sumber pangan pokok (sumber karbohidrat) utama masyarakat Temanggung. Berbagai upaya peningkatan produksi di sektor peternakan dan perikanan, serta pengembangan komoditas tanaman pangan

sumber protein nabati seperti kacang-kacangan menjadi tumpuan ketersediaan protein daerah, meskipun untuk komoditas kedelai Temanggung belum bisa swasembada, namun pasokan dari luar daerah mampu menjamin ketersediaan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

- ❖ Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjaga kelestarian lahan pertanian cukup tinggi ditunjukkan dengan ditetapkannya Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Gubernur Jawa Tengah memberikan penghargaan dan pin emas kepada Bupati Temanggung selaku pimpinan daerah yang peduli terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- ❖ Faktor pengendalian pertumbuhan penduduk juga turut menjadi kunci tingkat ketersediaan energi maupun protein, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah konsumsi pangan, sedangkan secara umum, tingkat pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi pangan percepatannya tidak sebanding.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan adalah sebesar Rp. 5.225.185.478,- atau 93,69% dari total pagu sebesar Rp. 5.579.624.100,-. Dengan capaian rata-rata yang mencapai 119,3% dan capaian realisasi keuangan yang mencapai 93,69% maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.
- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh :
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
 - Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
 - Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
 - Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
 - Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar



Gambar 3.1 Pelatihan rice transplanter

Tahun 2016 telah dilaksanakan pemberdayaan lumbung pangan melalui kegiatan pemberdayaan lumbung pangan desa sejumlah 2 kelompok lumbung dari dana



APBD I Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kelompok Tani Makmur desa Caruban Kecamatan Kandangan serta Gapoktan Terus Makmur Desa Medari Kecamatan Ngadirejo melalui kegiatan pengisian lumbung pangan dengan bantuan berupa gabah kering masing – masing sejumlah 2.8 ton. Disamping itu juga terlaksana kegiatan pembangunan Lumbung Cadangan Pangan di dua lokasi yaitu Kelompok Tani Budi Lestari IV desa Katekan Kecamatan Ngadirejo dan Kelompok Tani Maju Lancar desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo dengan sumber dana DAK.

Kegiatan lain yang mendukung peningkatan cadangan pangan masyarakat adalah Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, dimana terlaksana pendampingan untuk Gapoktan Rejo Makmur desa Rejosari Kecamatan Pringsurat yang pada tahun 2016 mendapatkan kegiatan LDPM dari APBD I untuk modal usaha kelompok khususnya di bidang distribusi pangan.

Dengan pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya :

1. Tersedianya modal usaha di gapoktan/ kelompok tani untuk mengembangkan usahanya
2. Harga gabah / beras di wilayah gapoktan dapat di stabilkan, terutama pada saat panen raya
3. Akses pangan, khususnya bagi anggota gapoktan meningkat
4. Meningkatnya kemampuan manajemen gapoktan



Gambar 3.2 Peresmian Lumbung Pangan oleh Wakil Bupati

Sampai dengan akhir tahun 2016 telah dilaksanakan upaya pemberdayaan bagi 53 lumbung, atau 89.83 % dari target kinerja sebesar 59 unit.

Cadangan Pangan Pemerintah juga terdapat di tingkat desa berupa CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Desa), Kecamatan, Kabupaten, Provinsi yang berada pada BPCP (Balai Pengelolaan Cadangan Pangan), atau pusat yaitu pada perum BULOG, dimana tiap-tiap Kabupaten mendapat alokasi 100 ton untuk dipergunakan apabila terjadi bencana. Kabupaten Temanggung memiliki gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten yang berada di kelurahan Kertosari, dibangun melalui dana DAK tahun 2011 dengan kapasitas mencapai 100 ton.

Pengisian Gudang dilaksanakan setiap tahun, untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah, dan di Tahun 2016 telah dilaksanakan pengisian sebanyak 10 ton gabah kering giling melalui kegiatan Pengisian Gudang Cadangan Pangan sebagai Antisipasi Kerawanan Pangan.

- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat melebihi target di tahun 2016, maka sasaran akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya ketahanan pangan daerah akan dapat tercapai di tahun 2018.

3. Sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Investasi

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada satu indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran 3

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Investasi Daerah											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1	Laju investasi	18,77	25,00	100	16,28	46,67	100	14,43	18,00	124,7	14,43
Rata rata capaian sasaran		100			100			124,7			

Ket. : TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Capaian kinerja **Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah** ditunjukkan dengan laju investasi tahun 2016 yang telah tercapai 100%. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan kebijakan perizinan secara paket yang menerapkan izin secara paralel dalam satu berkas permohonan (SIUP, TDP, dan HO dapat diurus bersamaan). Sehingga memudahkan para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Temanggung. Disamping itu, perhitungan besaran investasi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana nilai investasi meliputi tanah, bangunan, mesin dan sarana prasarana lainnya. Nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp. 147,182 milyar bersumber dari 2.552 investor. Pada tahun 2015 nilai investasi yang tercatat sebesar Rp. 124,679 milyar dari 2.666 investor, dan tahun 2014 nilai investasi Rp. 85,001 milyar dari 1.439 investor.



Gambar 3.3 Situasi Pelayanan di KP3M

- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah adalah sebesar Rp. 886.722.340,- atau 78,09 % dari total pagu

sebesar Rp. 1.143.284.000,-. Dengan capaian sasaran 124,7% dan capaian realisasi keuangan yang mencapai 78,09 % maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.

- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh :
 - Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - Program Peningkatan Pelayanan PerizinanBeberapa kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan investasi diantaranya:
- ✓ Penyelenggaraan Pameran investasi
 1. Batam Investment Tourism and Trade (BITTRA EXPO) 2016 tanggal 24 s.d 27 Maret 2016 di Batam;
 2. AITIS (Apkasi International Trade and Investment Summit) 2016 tanggal 5 s.d 7 Mei 2016 di Jakarta;
 3. Invesda Expo 2016 tanggal 26 s.d 29 Mei 2016 di JEC Yogyakarta;
 4. Publik Service and Invesment expo (INAVEST) 2016 tanggal 16 s.d 18 2016 di Gedung Landmark Bandung;
 5. Temanggung fair tanggal 27 s.d 31 Oktober 2016 di gedung pemuda Temanggung;
 6. Central java Bussines forum (CJIBF) tanggal 26 Oktober 2016 di Jakarta;
 7. Bali Craft, Invesment and tourism Expo 2016 tanggal 24 s,d 27 Nopember 2016 di Bali
- ✓ Penyelenggaraan Temu Usaha dengan tema “ satu langkah menuju “Wounderfull Tourism”.
- ✓ kerjasama dengan UMKM sebagai penyokong barang maupun penyedia jasa.
- ✓ Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal yaitu dengan tersedianya kajian kawasan peruntukan industri di wilayah Kranggan –Pringsurat.
- ✓ Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal di 36 Perusahaan.



Gambar 3.4 AITIS (Apkasi International Trade and Investment Summit)

4. Sasaran Strategis: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Untuk mengukur Sasaran ke empat dilakukan pengukuran terhadap satu indikator kinerja dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan kategori baik. Untuk mengukur sasaran Strategis “**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah**” dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran 4

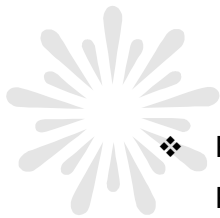
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1	Tingkat pertumbuhan ekonomi	5%	5,06 %	100 %	5%	5,17%	100 %	5%	5,19 %	103,8 %	5%
Rata-rata capaian sasaran					100						103,8

Ket. TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Sepanjang tahun 2014 hingga 2016, kinerja perekonomian Kabupaten Temanggung selalu tumbuh positif diatas 5 persen. Untuk tahun 2016 dari target 5 % telah tercapai 5, 19 %. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2016 melebihi dari target yang sudah ditentukan
- ❖ Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah**” telah tercapai 100% sejak tahun 2014. Hal ini membuktikan bahwa upaya meningkatkan perekonomian telah berhasil dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, yaitu:
 - Meningkatkan penyerapan tenaga kerja

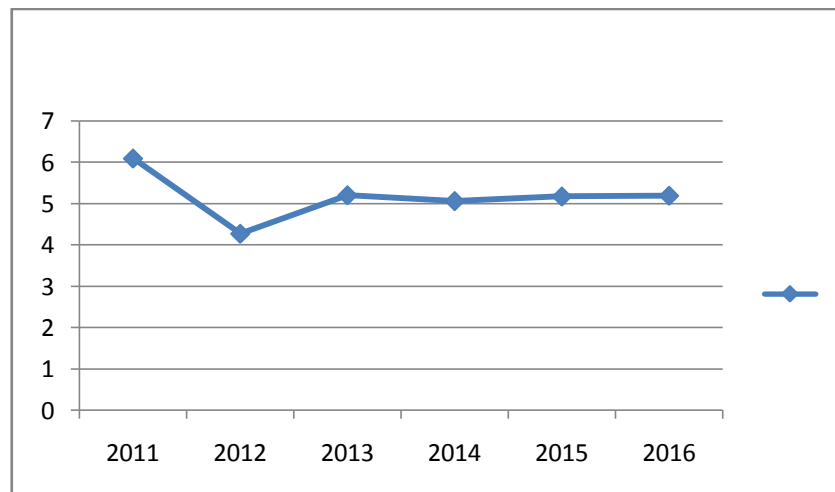
Sepanjang 5 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kabupaten Temanggung sangat rendah yaitu dibawah 5 persen. Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 4,87 persen. Selanjutnya pengangguran mengalami penurunan menjadi 3,19 persen pada 2015 dan menjadi 1.50 persen pada 2016. Pada 2014 – 2015, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung merupakan pengangguran yang terendah diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah.
 - Meningkatkan produktifitas ekonomi

Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 8.062.000,- sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 9.929.1000,-.



- ❖ Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan perbandingan pencapaian kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode sebelumnya. Pertumbuhan paling tinggi dicapai pada tahun 2011 yaitu mencapai 6,09 persen, kemudian melambat pada tahun 2012 yaitu hanya 4,27 persen. Selanjutnya 2013 – 2016 perekonomian tumbuh konsisten diatas 5 persen meskipun masih tetap fluktuatif.

Tabel 3.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, 2011 – 2016



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

- ❖ Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama periode 2011 - 2016 cenderung mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan ekonomi mengalami fukuasi yang tajam. Secara umum juga dapat dilihat bahwa sepanjang 2011 – 2016, IPM Kabupaten Temanggung selalu berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah, sebaliknya pada tahun 2011 dan 2013 mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Derah adalah sebesar Rp. 5.976.017.476,- atau 85,79 % dari total pagu sebesar Rp. 9.221.188.510,-. Dengan capaian sasaran 103,8% dan capaian realisasi keuangan yang mencapai 85,79 % maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.
- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh keberhasilan beberapa Program yang meliputi:



- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Program pengembangan Industri kecil dan menengah
- Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- Program Pengelolaan Pasar Daerah
- Program peningkatan sarana dan prasarana lainnya



Gambar 3.5 Stan Kopi Indonesia pada Acara Speciality Coffee Association of America (SCAA) Expo tanggal 14-17 April 2016, di Atlanta, Georgia Amerika Serikat

Selain program di atas, beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya:

- ✓ Membangun 2 pasar yaitu Pasar Ngadirejo dan Pasar Batok di Wonobojo. sehingga dengan komitmen, kerja keras dan dukungan Pemerintah kabupaten Temanggung akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2018 yaitu 5 unit pasar (sarana perdagangan), sedangkan yang direncanakan akan dibangun pada tahun 2017 adalah pasar Pingit, dan Pasar Agro Kranggan.
 - ✓ Melakukan promosi produk unggulan daerah seperti kopi, kerajinan tangan
 - ✓ Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar. Hasil dari sidak di tahun 2016 terdapat 5 produk tidak layak edar
 - ✓ penyelesaian sengketa konsumen dengan menyelesaikan 177 perkara yang masuk.
- ❖ Jika dilihat dari rata-rata 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 5 %, maka untuk sasaran ini akan tercapai di akhir RPJMD.

5. Sasaran Strategis: Meningkatnya kunjungan wisatawan

Untuk mengetahui capaian kinerja pada sasaran strategis 5 dilakukan pengukuran pada indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran 5

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kunjungan wisatawan											
INDIKATOR KINERJA	2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD	
	TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK		
1	Tingkat kunjungan wisatawan	10 %	10 %	100%	15 %	15 %	100 %	20 %	21%	101 %	30%
Rata-rata capaian sasaran		100			100			101			

Ket. TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Temanggung tahun 2016 mengalami kenaikan dan melebihi target, dari target 20 % telah dapat terealisasi 21 %. Capaian kinerja ini dapat dilihat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, untuk Tahun 2016 ini ditargetkan sebanyak 432.165 wisatawan. Dari target tersebut sebanyak 364 wisatawan mancanegara dan 438.017 wisatawan domestik telah mengunjungi beberapa obyek wisata di Kabupaten Temanggung.
- ❖ Jika dibandingkan dengan Tahun 2012 dan 2015, pada indikator ini jumlah wisatawan di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini karena adanya beberapa tempat wisata baru yang mulai tumbuh dan ramai dikunjungi wisatawan, antara lain adalah Pikatan water park dan Posong.

Perkembangan wisatawan dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perkembangan Wisatawan (jiwa)
Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah wisatawan manca negara	77	21	155	435	364
2.	Jumlah wisatawan domestik	360.061	269.614	338.936	395.717	438.017

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

- ❖ Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kunjungan wisatawan” telah tercapai 100%. Hal ini membuktikan bahwa upaya meningkatkan pada sektor pariwisata dan budaya telah berhasil dilaksanakan di Kabupaten



Temanggung dimana beberapa indikator yang mendukung sasaran telah meningkat, yaitu:

- Berkembangnya kawasan wisata
 - meningkatnya pengembangan produk/event/atraksi wisata
 - meningkatnya pengelolaan Wisata
 - Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan adalah sebesar Rp. 17.663.747.431,- atau 87,63 % dari total pagu sebesar Rp. 19.199.729.400,-. Dengan capaian sasaran 101% dan capaian realisasi keuangan yang mencapai 87,63 % maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.
- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh keberhasilan beberapa Program yang meliputi:
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Program Pengembangan Kemitraan
 - Program Pengembangan Produk Wisata



Gambar3.6 wisata Posong

Guna mendukung sasaran ini Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Melakukan ekskavasi Penelitian Situs Liyangan di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo di area G berupa data tentang aktivitas pertanian kuna bekerjasama dengan Balai Arkeologi Yogyakarta dan ekskavasi Pelestarian di Situs Liyangan bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
- ✓ Terlaksananya festival Budaya Kabupaten Temanggung, sebanyak 5 event yaitu Dsn. Lamuk Gunung Ds. Legoksari Kec. Tlogomulyo, Ds. Gondangwinangun

Kecamatan Ngadirejo, Dsn. Liyangan Ds. Purbosari, Kec.Ngadirejo, Dsn. Pete Ds. Kembang Sari Kec. Kandangan dan di Kota Temanggung dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Temanggung tahun 2016

- ✓ Terlaksananya pentas seni di luar daerah sebanyak 7 event sebagai berikut : Pentas di TMII, Pentas Parade Seni Jateng, Pentas Bakorwil II, Pentas Hari Jadi Kab. Kulon Progo DIY, Pentas Hari Jadi Kab. Kendal, Festival Lagu Daerah di Semarang, dan Pentas di PRPP Semarang;
- ✓ Terlaksananya keikutsertaan pameran skala Nasional Nusantara Ekspo dan Forum, Jember Carnival n Exhibition, Temanggung Fair, Festival Jamu dan Pengiriman Pokdarwis dalam Lomba Pokdarwis Tingkat Propinsi Jawa Tengah di Klaten
- ❖ Jika dilihat dari rata-rata 5 tahun terakhir, peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2013 yang hanya 269.614 wisata domestic dan 21 wisata mancanegara. Akan tetapi dengan upaya keras, ditahun 2014 sampai dengan 2016 dapat meningkat lagi. Dengan melihat perkembangan data pada table 3.8 maka di akhir RPJMD 2018 pada indikator meningkatnya jumlah wisatawan akan dapat tercapai.



Gambar 3.7 Kolam renang Pikatan WaterPark

Misi Dua

Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang agamis berbudaya dan sejahtera.

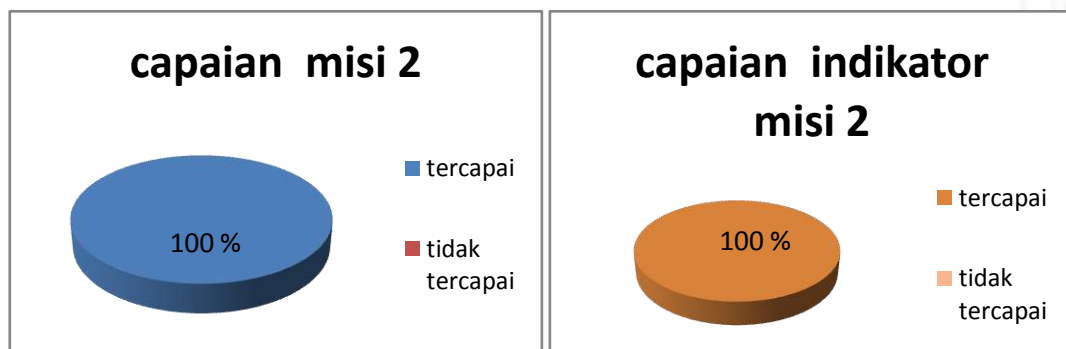
Pada misi II yaitu **Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang agamis berbudaya dan sejahtera** terdapat 3 sasaran sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin
3. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan

Pencapaian sasaran dan indikator pada misi II dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13

Pencapaian Misi II dan Indikator



Dari 3 sasaran yang ada pada misi 2, telah tercapai sesuai dengan target. Untuk indikator pada misi 2 ini terdapat 3 indikator kinerja yang semuanya dapat terealisasi sesuai dengan target. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi II adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Menurunnya Tingkat Pengangguran

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini telah dilakukan pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Sasaran 6

SASARAN STRATEGIS : Menurunnya Tingkat Pengangguran											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1.	Angka Pengangguran	6,54	5,86	89,59	5,0	4,08	81,6	4,75	1,50	168	4,25
Rata-rata capaian sasaran				89,59			81,6			168	

Ket. TK = Target Kinerja RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Secara umum capaian indikator pada sasaran “Menurunnya tingkat pengangguran” di Kabupaten Temanggung dapat dicapai dengan kategori memuaskan. Pada tahun 2016, sasaran ini tercapai 168%, dari target yang telah ditetapkan angka pengangguran 4,75% tercapai 1,5%. Keberhasilan ini didukung oleh banyaknya jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan tingkat kesempatan kerja berdasarkan lowongan kerja yang ada.

Tabel 3.15
Jumlah Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan
Tenaga Kerja Tahun 2016

BULAN	PENCARI KERJA			LOWONGAN			PENEMPATAN		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Januari	47	45	92	95	80	175	61	44	105
Februari	56	54	10	56	75	131	35	41	76
Maret	48	36	84	18	94	112	8	67	75
April	38	27	65	13	44	57	16	40	56
Mei	339	720	1.059	74	352	426	14	70	84
Juni	174	243	417	3	48	51	3	38	41
Juli	128	97	225	715	1.342	2.057	5	49	54
Agustus	99	77	176	687	1.298	1.985	23	75	98
September	85	79	164	20	134	154	13	118	131
Oktober	77	107	184	21	70	91	12	46	58
November	51	78	129	57	176	233	12	148	160
Desember	53	111	164	53	45	98	33	29	62
JUMLAH	1.195	1.674	2.869	1.812	3.758	5.570	235	765	1.000

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Temanggung

- ❖ Untuk memperoleh data tenaga kerja maupun jumlah pengangguran yang ada telah dibuat sistem aplikasi tenaga kerja.
- ❖ Jika dibandingkan dengan pencapaian dua tahun sebelumnya, maka capaian kinerja pada tahun 2016 jauh lebih baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, capaian kinerjanya naik 8,4% dari 81,6% menjadi 100% dan naik 10,41% dari tahun 2014. Capaian kinerja pada tahun 2015, adalah yang paling jelek jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 maupun tahun 2016.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran ini adalah sebesar Rp 1.658.344.603,- atau 85,68% dari total pagu sebesar Rp 1.841.804.875,-.

Dengan capaian indikator kinerja yang dapat tercapai 168 % dan capaian realisasi keuangan 85,68%, menunjukkan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya.
- ❖ Pencapaian target kinerja tahun 2016, tidak terlepas keberhasilan program peningkatan kesempatan kerja yang meliputi:
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Selain program yang telah dilaksanakan tersebut,berikut beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung di tahun 2016:

- ✓ mengadakan jobfair atau bursa lowongan pekerjaan yang dilaksanakan di Gedung Pemuda selama 2 hari. Kegiatan ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat Temanggung yang akan mencari pekerjaan.
- ✓ Menaikan upah minimum regional dari Rp. 1.178.000,- menjadi Rp. 1.313.000,-
- ✓ Mewajibkan pekerja/ buruh pabrik untuk menjadi anggota Jaminan sosial tenaga kerja, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja bisa digunakan untuk meringankan beban tenaga kerja.
- ✓ pengembangan wilayah transmigrasi, dengan kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.
- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi di tahun 2016, maka sasaran akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu menurunnya tingkat pengangguran dengan indikator angka pengangguran sebesar 4,25 akan dapat tercapai di tahun 2018.



Gambar 3.8 Job fair 2016

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

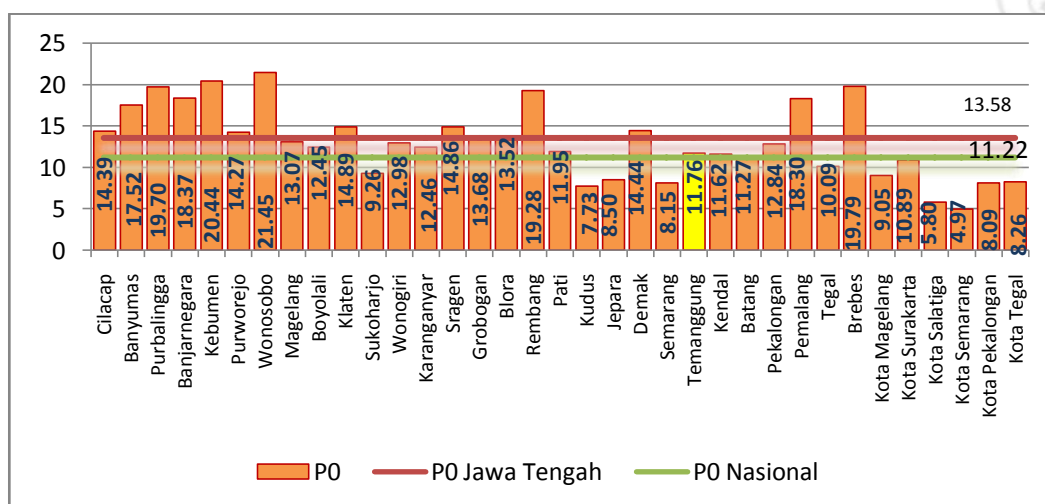
Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran 7

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga sasaran											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1	Angka kemiskinan	15,6	11,5	100	14,4	11,7	100	13,3	11,5	113	11
Rata-rata capaian sasaran				100			100			113	

Ket. TK= Target Kinerja RK= Realisasi Kinerja CK= Capaian Kinerja

- ❖ Capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin**” dengan indikator angka kemiskinan di tahun 2016 telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 13,3% angka kemiskinan, berdasarkan penghitungan sementara diketahui angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada akhir tahun 2016 telah berada pada kisaran 11,55%.
- ❖ Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun secara Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

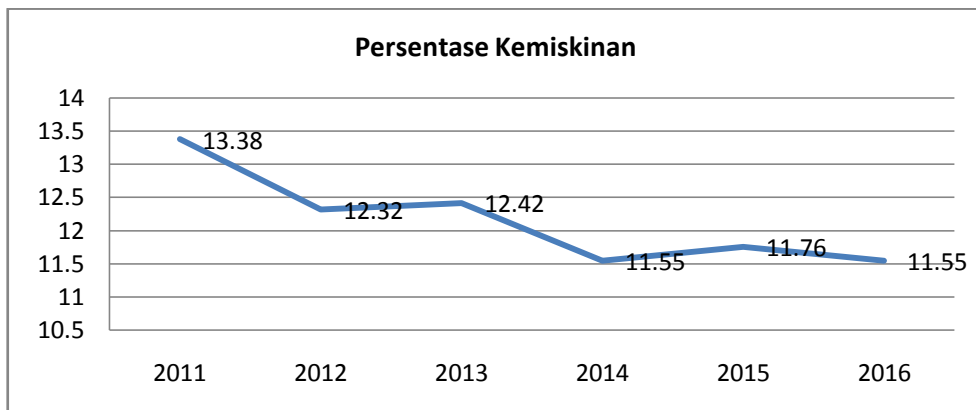
Tabel 3.17
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Jawa Tengah 2015



Sumber : BPS, data diolah

- ❖ Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung sebesar 11,76% berada dibawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,58% tetapi berada sedikit di atas Nasional sebesar 11,22%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karisidenan Kedu, maka angka kemiskinan Kabupaten Temanggung masih lebih baik di bandingkan dengan Kabupaten Wonosobo (21,45%), Kabupaten Kebumen (20,44%), Kabupaten Purworejo (14,27%), Kabupaten Magelang (13,07%) dan hanya kalah dari Kota Magelang (9,05%).
- ❖ Sedangkan perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 3.12. berikut ini :

Tabel 3.18
Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%)
Kab. Temanggung, Tahun 2011–2016



Sumber : BPS, data diolah

- ❖ Jika kita melihat tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2011 sampai 2016, maka persentase kemiskinan dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan kecuali pada tahun 2013 dan 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan masih berada pada angka 13,38% kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 12,32%. Di tahun 2013 tingkat kemiskinan mencapai 12,42% kemudian turun menjadi 11,55% di tahun 2014. Dan mengalami peningkatan sebesar 0,21% menjadi 11,76% di tahun 2015. Pada akhir tahun 2016 tercapai 11,55% turun sebesar 0,21% dibandingkan tahun 2015.
- ❖ Sumber daya keuangan yang digunakan pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 9.076.113.655,- atau 91% dari total pagu sebesar Rp. 10.012.926.755,-. Jika dibandingkan capaian rata-rata indikator kinerja yang mencapai 113% dengan capaian anggaran sebesar 91% maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.
- ❖ Pencapaian target kinerja tahun 2016, tidak terlepas dari sinergi program penanggulangan yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, anata lain melalui:
 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan
 - Program Pengembangan Perumahan

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program pembinaan anak terlantar
- Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Temanggung dapat dicapai sesuai dengan target.



Gambar 3.9 Pemberian bantuan kepada disabilitas

- Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2015 dengan target 18 % dapat tercapai 100 %. Jika dibanding dengan target Renstra yaitu 18 % capaian sampai dengan 2015 sebesar 2015 adalah 100% atau tercapai 555%. Sementara jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 80 % tercapai 100 % atau tercapai 125 %. Hal ini dikarenakan adanya program Pemerintah Pusat berupa bantuan Raskin atau sekarang disebut Rastra untuk semua keluarga miskin di Kabupaten Temanggung.

- Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial

Capaian indikator PMKS yang memperoleh Rehabilitasi sosial dari tabel dapat dijelaskan bahwa dari target tahun 2015 sebesar 3.08 % tercapai 2,27 % atau tingkat capaiannya adalah 71 %. Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan diantaranya :

- o Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial

PMKS yang memperoleh perlindungan sosial, target di tahun 2016 yaitu 100 % sudah dapat tercapai termasuk jika dibandingkan dengan target Renstra. Hal ini dikarenakan adanya dukungan Rumah Perlindungan Sosial yang sudah beroperasi secara resmi sejak Januari Tahun 2016.

- o Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Bantuan Sosial dan Fasilitasi kegiatan untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni pada tahun 2016 dengan target Renstra sebesar 24,34 % pada tahun 2016 sudah mencapai 12,99 % atau 53%. Tetapi jika dibandingkan dengan target khusus di Tahun 2016 maka dari target 500 KK RTLH tercapai lebih dari 622 karena adanya dana dari APBN, Dan dukungan dari CSR atau dunia usaha.



Gambar 3.10 Survei RTLH

- o Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Capain untuk LKS atau Panti yang telah menyediakan sarpras sudah tercapai 100 % hal ini bahkan melebihi target Nasional yang menetapkan pada SPM indikator ini sebesar 80 %.

Hal ini dikarenakan semua panti atau LKS di Kabupaten Temanggung sudah menyediakan sarpras untuk pelayanan sosialnya. Baik Gedung, dan fasilitas lainnya. Bahkan telah berkembang Panti-Panti baru yang semula hanya 6 buah sekarang menjadi 8 buah panti.

- o Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran

Perlindungan sosial terhadap rumah tangga sasaran capaian kinerjanya tahun 2016 sebesar 100 %, Hal ini karena adanya dukungan dari Pemerintah Pusat berupa program perlindungan sosial baik berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, Raskin maupun Penerima

Bantuan luran Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga capaian kinerjanya bisa mencapai 100 %.

- Persentase anak terlantar yang tertangani

Untuk Anak terlantar yang tertangani, dengan target tahun 2016 sebesar 1,28 hanya tercapai 0,96 atau 75%. Hal ini terkait dengan adanya jumlah anak panti yang dilatih melalui LPK belum sesuai dengan jumlah sasarannya. Hal ini dikarenakan bahwa pelatihan anak panti sering terkendala oleh waktu yang bersamaan dengan waktu sekolah, dan beribadah atau program lainnya dari panti yang bersangkutan.

- Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Capaian indikator untuk tahun 2016 sebesar 3,31 tercapai 2,71 atau lebih dari 100 % karena adanya dukungan anggaran APBN untuk Lanjut Usia maupun untuk Penyandang Cacat/Disabilitas. Namun jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 40 % masih kurang sekitar 36,69 % atau masih ada sekitar 3918 jiwa tambahan.

- Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis.

Dari target tahun 2016 sebesar 1 % tercapai 2,72 atau 272 %. Tetapi jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 80 % sasaran yang harus dilayani masih sangat jauh yaitu ada kekurangan 77,28 % dari jumlah Fakir Miskin di Kabupaten Temanggung dengan basic data tahun 2013 sejumlah 68.904 KK maka diperlukan penambahan sasaran sejumlah 53.250 KK.

- Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS. Untuk capain kinerjanya sudah mencapai 100 %, hal ini dikarenakan adanya upaya untuk membangun komunikasi dengan Dunia Usaha agar dapat berperan aktif dalam penanganan PMKS.

- Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS. Untuk capain kinerjanya sudah mencapai 100 %, hal ini dikarenakan adanya upaya untuk membangun komunikasi dan berupaya memfasilitasi kegiatan untuk berbagai Forum seperti TKSK, Karang Taruna, PSM, Tagana dan LK3 atau pun K3S. dengan Dunia Usaha agar dapat berperan aktif dalam penanganan PMKS.

- Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- ❖ Apabila seluruh program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara konsisten, diperkirakan angka kemiskinan akan tercapai sesuai dengan target akhir RPJMD sebesar 11%. Meskipun dapat dipastikan bahwa target di akhir tahun RPJMD akan tercapai, tetapi tetap perlu kerjasama seluruh stakeholder untuk tetap fokus dalam upaya penurunan angka kemiskinan mengingat capaian kinerja selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan.

3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan

Tingkat ketertiban dan keamanan dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi. Semakin tinggi angka kriminalitas, berarti tingkat ketertiban dan keamanan masyarakat rendah. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan rumus jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Untuk mengetahui angka kriminalitas, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.19
Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung
Tahun 2012-2016

No	Jenis Kriminalitas	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus narkoba	7	3	14	13	17
2	Jumlah kasus pembunuhan	3	1	1	0	0
3	Jumlah kasus kejahatan seksual	3	3	6	11	19
4	Jumlah kasus penganiayaan	37	13	35	24	39
5	Jumlah kasus pencurian	64	64	97	134	117
6	Jumlah kasus penipuan	41	20	29	60	52
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	2	3	0
8	Jumlah Tindak Kriminal	155	104	184	245	244
9	Jumlah penduduk	733.418	739.873	731.061	788.264	803.745
10	Angka kriminalitas	2,11	1,41	2,49	3,11	3,03

Sumber: Kepolisian Resort Temanggung Tahun 2017

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran 8

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1	Menurunnya angka Kriminalitas	5,0	2,49	100	4,8	3,11	100	4,7	3,03	135	11
Rata-rata capaian sasaran				100			100			135	

Ket. TK= Target Kinerja RK= Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran “**Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan**” di Kabupaten Temanggung pada tahun ini telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 4,7 angka kriminalitas, pada akhir tahun 2016 telah berada pada kisaran 3,03.
- ❖ Jika kita melihat angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung dari tahun 2012 sampai 2016, maka angka kriminalitas dari tahun ke tahun selalu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 angka kriminalitas masih berada pada angka 2,11 kemudian turun pada tahun 2013 menjadi 1,41. Di tahun 2014 naik mencapai 2,49 kemudian naik lagi menjadi 3,11 di tahun 2015. Pada akhir tahun 2016 angka kriminalitas berada pada angka 3,08 turun sebesar 0,08 dibandingkan tahun 2015.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 4.558.270.853,- atau 89,48 % dari total pagu sebesar Rp. 5.126.317.075,-. Dengan target kinerja yang tercapai 135 % dan realisasi keuangan sebesar 89,48 %, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.
- ❖ Pencapaian target kinerja tahun 2016, tidak terlepas keberhasilan program sebagai berikut:
 - program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
 - Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
 - Program pendidikan politik masyarakat
 - Program pengembangan wawasan kebangsaan

- Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan
- Program Pengembangan Nilai Keagamaan

Berikut beberapa hambatan dan solusi untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Tahun 2016

- Untuk indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pada tahun 2016 tercapai 94,24 % atau belum dapat mencapai target dari target akhir dalam rencana strategis, yaitu 100 %. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelanggaran perda yang ditangani sejumlah 1.030 pelanggaran dibagi jumlah pelanggaran selama tahun 2016 sejumlah 1.093 pelanggaran dikalikan 100. Meskipun demikian hal tersebut perlu mendapatkan apresiasi mengingat upaya-upaya yang dilaksanakan masih tahap non yustisial karena belum adanya PPNS di Satpol PP untuk melanjutkan ke tahap pro yustisial.
- Untuk indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, capaian pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan dokumen perencanaan strategis baru tercapai 33,33 %. Dari target 3 kali tiap kecamatan setiap tahunnya, baru dilaksanakan 1 kali tiap kecamatan dalam satu tahunnya.
- Sementara untuk indikator rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas), capaian pada tahun 2016 adalah 1,61 anggota linmas di tiap RT. Sementara target yang ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah adalah 1,62 sehingga sudah melebihi dari target rencana strategis Satpol PP dengan persentase capaian 99,39 %. Di tahun 2016, jumlah anggota Linmas di Kabupaten Temanggung adalah 8.868 orang yang tersebar di 5.520 RT.
- Untuk indikator angka kriminalitas capaian pada tahun 2016 adalah sebesar 0,30 dari target akhir dalam rencana strategis 0,46 dari setiap 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung atau capaiannya adalah 153,33 %. Dari capaian tersebut, maka capaian pada tahun 2016 sudah mencapai dari target yang ditentukan dalam dokumen rencana strategis. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah kriminal yang ada adalah 244 tindak kriminal (data berasal dari Polres dan Satpol PP Temanggung) dan jumlah penduduk 805.2553 jiwa pada bulan Desember 2016.
- Sementara untuk indikator cakupan penanganan demonstrasi capaian pada tahun 2016 sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam rencana

strategis, yaitu 100 %. Dalam pelaksanaan penanganan demonstrasi, upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dari indikator dalam sasaran meningkatnya ketertiban dan keamanan, ada beberapa indikator yang merupakan indikator yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Jika realisasi capaian dibandingkan dengan indikator SPM tersebut, maka dapat kami gambarkan sebagai berikut :

- Untuk target cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota, target dalam SPM adalah 100 % dan harus tercapai pada tahun 2015. Sehingga perbandingan capaian pada tahun 2016 dengan target dalam SPM adalah sebesar 94,24 %.
- Untuk target cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas), target dalam SPM adalah 1 orang tiap RT dan harus tercapai pada tahun 2014. Sehingga perbandingan capaian pada tahun 2016 dengan target dalam SPM adalah sebesar 161 %, artinya bahwa secara kuantitas, target tersebut sudah tercapai.
- Sementara untuk indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meskipun dalam SPM ada, akan tetapi rumusan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh belum tercukupinya SDM yang ada di Satpol PP. Dalam SPM, targetnya adalah 3 kali patroli dalam sehari di setiap kecamatan. Sementara yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung yang dirumuskan dalam IKD, targetnya baru patroli yang dilaksanakan secara merata di tiap kecamatan (1 kali di tiap kecamatan dalam 1 tahun).

Penyebab menurunnya capaian kinerja pada tahun 2016, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh belum tercapainya target untuk indikator Cakupan penegakan peraturan daerah yang baru tercapai 94,24 % dari target 100 %. Hal tersebut disebabkan karena dalam upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah masih dilakukan upaya-upaya non yustisial karena belum adanya perangkat (SDM PPNS) untuk melanjutkan ke tahapan pro yustisial. Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengoptimalkan SDM yang ada guna melakukan upaya-upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara non yustisial.

- ❖ Perlu kerjasama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar angka kriminalitas terus bisa ditekan meskipun sudah melebihi target sampai dengan akhir tahun RPJMD.



Gambar 3.11. operasi galian C di Kecamatan Kledung

Misi Tiga

Mewujudkan peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan dan perkotaan yang layak dan berwawasan lingkungan.

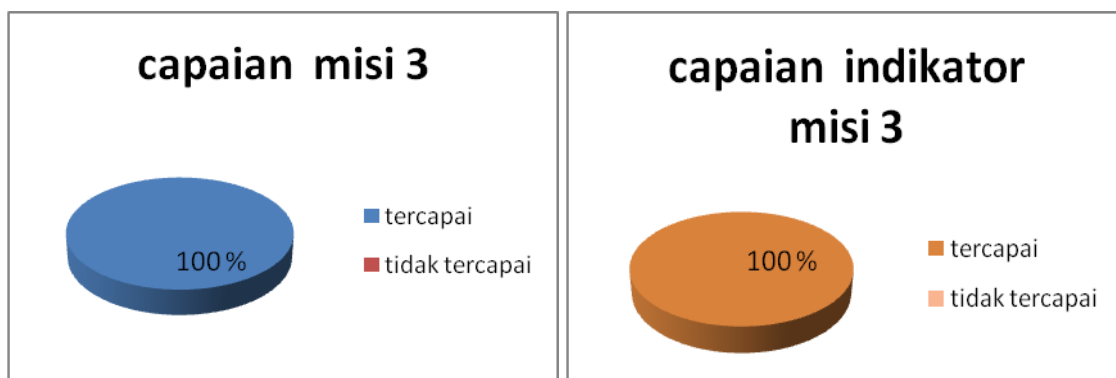
Pada misi III yaitu “mewujudkan peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan dan perkotaan yang layak dan berwawasan lingkungan” terdapat 2 sasaran yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur; dan
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Pencapaian sasaran dan indikator pada misi III ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21

Pencapaian Misi III dan Indikator



Dari 2 sasaran yang ada pada misi III, seluruh sasaran telah dilaksanakan dan telah tercapai sesuai dengan target pencapaian (100 %). Untuk mengukur indikator pada misi III ini terdapat 4 indikator kinerja dimana 100 % (seluruh indikator) telah terlaksana sesuai dengan target. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi III adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas infrastruktur

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang menjadi sasaran strategis pada misi ke-3 diukur dengan melihat pencapaian indikator kinerja Presentase Jalan yang menjamin Pengguna Jalan berkendara dengan selamat dan nyaman serta Persentase minimal bencana yang terselesaikan. Untuk melihat target dan capaian dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran 9

SASARAN STRATEGIS : Menurunnya Tingkat Pengangguran											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1.	Presentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan nyaman (%)	70	70	100	73	76,4	100	76	85,3	112,2	82
2.	Persentase minimal bencana yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian sasaran				100			100			106	

Ket. RK = Realisasi CK = Capaian Kinerja TK = Target Kinerja

- ❖ Di tahun 2014 dan 2015, capaian kinerja sasaran “**meningkatnya kualitas infrastruktur**” diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman, dan persentase minimal bencana yang terselesaikan dengan capaian kinerja dari sasaran ini 100% dari target yang ditetapkan, selanjutnya di Tahun 2016 juga terealisasi 106%.
- ❖ Panjang jalan di Kabupaten Temanggung seluruhnya 739,127 km. Pencapaian pembangunan dan pemeliharaan jalan yang baik pada tahun 2016 sepanjang 630.697,07km atau 85,33%.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaiannya telah melampaui (capaian 85,33%, target akhir RPJMD 82%). Dengan telah dicapainya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat sebesar 85,33%, maka jalan di Kabupaten Temanggung telah bisa dinyatakan bahwa kondisi



Gambar. 3.12 Pembangunan Jalan

fungsi pelayanan jalan yang ada sudah layak untuk berkendara.

Kondisi kelayakan jalan dapat diukur berdasarkan peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2010 tentang tatacara, persyaratan, dan penetapan laik fungsi jalan. Berdasarkan peraturan tersebut, kondisi jalan di Kabupaten Temanggung dapat disebut dalam kondisi baik. Berikut kami sampaikan kondisi jalan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.23

Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Temanggung Tahun 2016

JENIS JALAN	KONDISI JALAN					
	PANJANG JALAN		BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
	(Km)	%	Panjang (Km)	Panjang (Km)	Panjang (Km)	Panjang (Km)
ASPAL	648,619	87,75	452,763		46,707	3752
BETON	63,928	8,65		122204	3,515	2,975
TELFORD	24,130	3,26				
TANAH	2,450	0,33				
TOTAL	739,127	100,00	630,697.1	61,723	46,707	27,895
Prosentase			85.33	7,77	6,72	5,48

- ❖ Pengukuran dampak (Impact) dari pembangunan jalan dan jembatan dilakukan dengan melihat angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tahun 2016 sebanyak 415 kasus dengan korban jiwa sebanyak 80 orang meninggal dunia dan total kerugian materi sebesar Rp. 642.800.000,00. Angka kasus kecelakaan menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yang terjadi sebanyak 418 kasus dengan korban jiwa 77 meninggal dan kerugian materi sebesar Rp 743.400.000,00. Penurunan kejadian kasus kecelakaan di Kabupaten Temanggung, walaupun hanya 3 kejadian ini patut menjadi catatan mengingat penambahan jumlah kendaraan dan mobilitas yang tinggi.
- ❖ Indikator persentase minimal bencana yang terselesaikan dapat dilihat dari jumlah bencana yang ada dan dapat ditangani di Kabupaten Temanggung sepanjang Tahun 2016, dan capaian indikator kinerja utama ini 100%. Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam.

Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung berupa bencana alam yang meliputi: bencana tanah longsor termasuk di dalamnya tanah retak, bencana banjir bandang, bencana angin ribut dan kekeringan. Selain bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, di Kabupaten Temanggung juga terjadi bencana non alam yakni bencana kebakaran. Berikut daftar bencana dan terselesaikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2016:

Tabel 3.24
Daftar Bencana yang Terjadi dan ditangani
Kabupaten Temanggung Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Bencana				Status Bencana
		Kebakaran	Angin	Banjir	Tanah Longsor	
1	Tretep	1	1		1	
2	Wonoboyo				1	
3	Bejen				1	
4	Candiroto	2		1	1	
5	Ngadirejo	1	1		1	
6	Parakan	4	1			
7	Kledung				1	
8	Bansari	11	1		1	
9	Bulu	3	1			
10	Temanggung	11	1	1	1	
11	Tlogomulyo	1	1			
12	Tembarak	7			1	
13	Selopampang				1	
14	Kranggan	6			1	
15	Pringsurat	9	1		1	
16	Kaloran	1			1	
17	Jumo					
18	Kedu	1	1			
19	Kandangan	1	1		1	
20	Gemawang				1	
Jumlah		59	10	2	15	

- ❖ Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, maka beberapa langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung antara lain:
 - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang kebencanaan.

- Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan memakai pola skala prioritas terhadap korban bencana
 - Bekerjasama dengan SKPD lain yang mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam penanggulangan bencana.
 - Berkoordinasi dengan Instansi/ Dinas lain yang terkait secara Integral baik pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana maupun pasca bencana
 - Selalu mengadakan perbaikan terhadap manajemen bencana (*disaster management*)
 - Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga terbentuk masyarakat tanggap bencana. Sosialisasi ini telah dilakukan sejak dini termasuk edukasi dan sosialisai pada anak-anak di tingkat pra sekolah atau taman kanak-kanak.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran ini adalah sebesar Rp 159.518.916.256,- atau 88,03% dari total pagu sebesar Rp 167.969.329.150,-. Dengan capaian indikator kinerja yang dapat tercapai 106 % dan capaian realisasi keuangan 88,03%, menunjukkan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya.
- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan kualitas infrastruktur ini dipengaruhi oleh beberapa program yang meliputi:
- Program Pembangunan jalan dan jembatan
 - Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - Program Pembangunan turap/talud/brojong
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
 - Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
 - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - Program peningkatan pelayanan angkutan
 - Pemberdayaan jasa konstruksi
 - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
 - Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- Program Tanggap Darurat dan Logistik
- Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selain program diatas beberapa upaya untuk mencapai sasaran ini telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan jaringan irigasi dengan capaian kinerja pembangunan jaringan irigasi partisipatif maka pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaanya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani semakin besar.
- Sedangkan untuk prosentase tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan kota sehingga tidak terjadi genangan telah tercapai 40,3% dan telah sesuai target tahunan dari target akhir RPJMD 40,7%. Sehingga saat ini genangan air dan banjir semakin berkurang di kawasan perkotaan.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berhasil meningkatkan rumah sehat dan layak huni yang tercermin pada meningkatnya jumlah tipe A dan B serta berkurangnya rumah tipe C



Gambar 3.13. Peresmian jembatan Sigandul

Selain program yang dibiayai oleh APBD kabupaten telah dilakukan pula kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat Temanggung diantaranya adalah Pembangunan Jembatan Sigandul di Kecamatan Kledung yang semula merupakan lokasi rawan kecelakaan (*black spot*) dan menghambat kendaraan (*bottle neck*) Sehingga dengan selesainya pembangunan Jembatan Sigandul ini menjadi jalur yang membuka akses ke wilayah Temanggung.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis ini telah dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran 10

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
3.	Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan Kriteria Baik (%)	29,1	29,1	100	30	30	100	30,2	34,9	115,3	31,25
4.	Persentase Pelayanan Sampah Perkotaan(%)	80	79,37	99	83	83	100	85	85	100	87
Rata-rata capaian sasaran				99,5			100			108	

Ket. RK= Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja TK = Target Kinerja

- ❖ Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui 2 indikator sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup capaian kinerjanya adalah sebesar 108%, sehingga rata-rata capaian sasaran ini Tahun 2016 sama seperti capaian Tahun 2015 yaitu diatas 100% dan jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 0.5%.
- ❖ Peningkatan realisasi kinerja Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan kriteria baik di Tahun 2016 dari 2 (dua) tahun sebelumnya, tidak lepas dari usaha Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memelihara RTH yang sudah ada, serta menciptakan RTH baru. Dari target 30,25% dan terealisasi sebesar 34,9% di Tahun 2016 merupakan hasil dari penataan RTRW yang senantiasa dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung. Tabel berikut menyajikan lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Temanggung:

Tabel 3.26
Daftar Taman Kota Kabupaten Temanggung Tahun 2016

NO.	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS
1	Taman Kota	Kecamatan Temanggung (17 lokasi)	21,863.36 m ²
2	Hutan Kota	Kecamatan Temanggung (2 lokasi)	10,950 m ²
3	Pulau Jalan	Kecamatan Temanggung (7 lokasi)	342.51 m ²
4	Jalur Hijau	Kecamatan Temanggung (7 lokasi)	7,921.10 m ²
Jumlah Total			41,076.97 m ²

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Temanggung Tahun 2016

- ❖ Peningkatan kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat dari menurunnya kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Temanggung selama beberapa tahun terakhir, serta terjaganya kelestarian plasma nuftah. Berikut daftar kasus pencemaran dan plasma nuftah di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2016 dan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2012:

Tabel 3.27
**Kasus Pencemaran Lingkungan dan Plasma Nuftah
 Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Kasus Pencemaran (kasus)						
1.	Pencemaran tanah	0	0	0	1	-
2.	Pencemaran air	1	0	0	3	3
3.	Pencemaran udara	2	5	1	5	3
Plasma Nuftah (jenis)						
1.	Plasma Nuftah Dilindungi					
	a.Hewan	14	14	16	16	14
	b.Tumbuhan	4	4	14	14	2

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Kasus Pencemaran (kasus)						
2.	Plasma Nuftah Terancam Punah					
	a.Hewan	7	7	16	16	12
	b.Tumbuhan	4	4	4	4	1
3.	Plasma Nuftah Endemik					
	a.Hewan	27	27	0	0	2
	b.Tumbuhan	14	14	0	0	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2016

- ❖ Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan perhatian yang cukup serius terhadap capaian sasaran ini. Keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang diraih pada Tahun 2016 dalam hal kelestarian dan kebersihan lingkungan baik ditingkat nasional maupun provinsi, sebagai berikut:
 - a. Penghargaan Anugrah Adipura Buana Tahun 2016
 - b. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016 yaitu :
 - SMP Negeri 2 Kledung
 - SMK Negeri 2 Temanggung
 - SMA Negeri 1 Pringsurat
 - SD Negeri 2 Kedung Ngumpul Kandangan
 - SMP Negeri 1 Tlogomulyo
 - SMP Negeri 1 Jumo.
 - c. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2016 yaitu :
 - SMP Negeri 1 Jumo
 - SMA Negeri 3 Temanggung
 - d. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 yaitu :
 - RW I, Kelurahan Temanggung I Kabupaten Temanggung
 - Dusun Dukuh, Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup ini adalah sebesar Rp. 32.955.971.022,- atau

92,01% dari total pagu sebesar Rp. 36.516.069.900,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,99 % dari pagu yang tersedia. Dengan capaian indikator kinerja rata-rata 108 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 92,01 %, maka dalam sasaran ini terdapat efisiensi dalam penggunaan sumberdaya.

- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh program sebagai berikut:
 - program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



Gambar 3.14 Penerimaan Adipura Buana Th 2016

Misi Empat

Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan kearifan lokal.

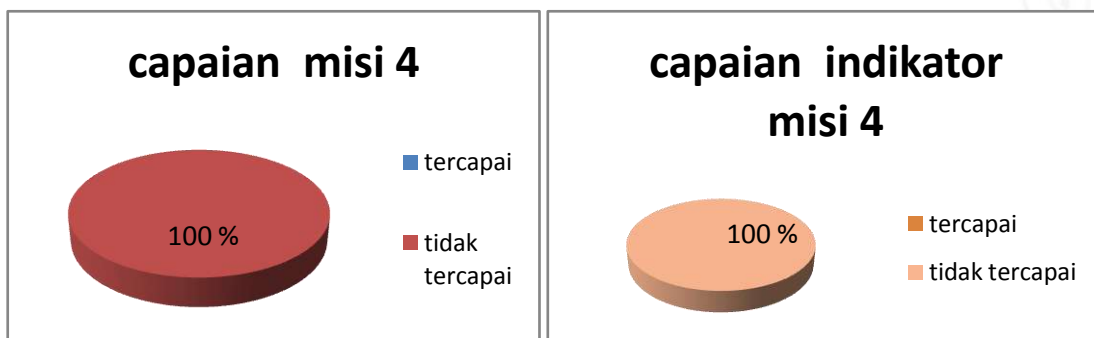
Pada misi IV yaitu **Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan kearifan lokal** memiliki sasaran strategis Meningkatkan kualitas pendidikan, dengan dua indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
2. Angka Melek Huruf (AMH)

Pencapaian sasaran dan indikator pada misi IV dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.28

Pencapaian Misi IV dan Indikator



Dari 2 sasaran yang ada pada misi IV, belum semua dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan target. Untuk indikator pada misi 4 ini terdapat 2 indikator kinerja yang semuanya belum dapat terealisasi sesuai dengan target. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi II adalah sebagai berikut:

6. Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pendidikan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini telah dilakukan pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.29

Capaian Kinerja Sasaran 11

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas pendidikan											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		T	RK	CK	T	RK	CK	T	RK	CK	
1.	Rata-rata Lama Sekolah	7,10	6,18	87,04	7,13	6,52	91,44	7,15	6,54 *	91,47	7,19
2.	PersentaseAngkaMelekH urufUsia ≥ 15 tahun	98,10	98,10	100	98,36	98,34	99,98	98,63	98,37	99,74	99,17
Rata-rata capaian sasaran				99,99			95,71			95,61	

Ket. T = Target RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

1. Rata-rata Lama Sekolah

- ❖ Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan **oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas** untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.
- ❖ Target kinerja disusun berdasarkan metode lama, sedangkan realisasi kinerja dihitung berdasarkan metode baru. Data Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung tahun 2016 belum ada rilis dari BPS Kab Temanggung, angka yang tercantum pada tabel di atas merupakan data perkiraan sesuai dengan target. Jika pada tahun 2016 tercapai sesuai dengan target yaitu 6,54 tahun, maka untuk mencapai target akhir RPJMD diperlukan kenaikan pada tahun 2017 sebesar 0,35 dan pada tahun 2018 minimal naik sebesar 0,30.

Pada tahun 2015 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung sebesar 6,52 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang telah mencapai 7,03 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah Nasional tahun 2015 sebesar 7,84 tahun. Rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung bersekolah hingga tamat SD atau kelas 1 SMP. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-26 dari 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah.

Dengan menggunakan indikator ini, pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih tertinggal di banding kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung menduduki peringkat ke 5 dari 6 kabupaten/kota. Jika penduduk Kabupaten Temanggung baru mencapai kelas 1 SMP, maka rata-rata penduduk Kota Magelang sudah mencapai pendidikan hingga kelas 2 SMA.

- ❖ Hambatan internal yang mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah adalah:
 - Rendahnya kemampuan sebagian masyarakat membiayai pendidikan.
 - Persebaran penduduk yang tidak merata, yang jauh dari lokasi lembaga pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
 - Belum tersedianya satuan pendidikan menengah di setiap kecamatan, ada beberapa kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah.
 - Belum memiliki perguruan tinggi negeri.
- ❖ Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi rendahnya Rata-rata Lama Sekolah adalah :

- Munculnya sikap skeptis terhadap program pembangunan pendidikan, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pendidikan bagiarganya.
 - Adanya sejumlah pihak yang memandang persoalan pendidikan secara parsial sehingga mengakibatkan berkembangnya isu dan iklim yang kurang kondusif bagi pelaksanaan program-program pembangunan bidang pendidikan.
 - Kurangnya lapangan kerja untuk menampung lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi, sehingga sebagian bekerja di luar Kabupaten Temanggung, dan mengurangi penduduk lulusan pendidikan menengah dan tinggi.
- ❖ Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah, adalah :
- Memperluas kesempatan dan meningkatkan pemerataan memperoleh pendidikan menengah dan tinggi bagi seluruh penduduk usia sekolah, termasuk yang mengalami hambatan sosial maupun ekonomi.
 - Meningkatkan sinergitas dan komitmen para pemangku kepentingan pendidikan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan pendidikan.
 - Meningkatkan lapangan kerja sehingga dapat menampung lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang lebih banyak, untuk mengurangi perpindahan lulusan pendidikan menengah dan tinggi.
- ❖ Perkembangan data rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2011 s/d 2015, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30

Rata-rata Lama Sekolah

No	Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kab Temanggung	7,09	7,10	7,10	6,18	6,52
2	Prov Jawa Tengah	7,29	7,39	7,43	6,93	7,03
3	Nasional				7,73	7,84

Keterangan : Tahun 2011-2013 metode lama, 2014-2015 metode baru

2. Angka Melek Huruf

- ❖ Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh

suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

- ❖ Berdasarkan tabel di atas AMH Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 sebesar 98,37% meningkat dibandingkan dengan tahun 2015, dan sama dengan kondisi tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka diperlukan kenaikan rata-rata sebesar minimal 0,40% pada tahun 2017 dan tahun 2018.

- ❖ Pendidikan Orang Dewasa (POD) dikenakan pada pendidikan nonformal (PNF) bagi peserta didik usia 15 tahun keatas. Layanan POD terdiri atas pendidikan keaksaraan dan peningkatan budaya baca, pendidikan kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keorngtuaan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan



Gambar 3.15 Kegiatan belajar kejar paket c di SKB Temanggung

Pencegahan perilaku destruktif. Pendidikan keaksaraan merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan. Selanjutnya, mereka yang telah memperoleh pendidikan keaksaraan dapat memperoleh pendidikan kesetaraan. Fokus pendidikan keaksaraan adalah meningkatkan keaksaraan dan keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha bagi penduduk usia 15 tahun ke atas melalui kursus dan pelatihan kerja. Pengentasan keniraksaraan dilakukan dengan menerapkan pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang dikombinasikan dengan pendidikan keterampilan dan peningkatan budaya baca.

- ❖ Hambatan internal yang dapat mempengaruhi tercapainya indikator kinerja Angka Melek Huruf :
 - Penduduk buta aksara sebagian besar berusia lanjut yang motivasi belajarnya rendah.

- Sebagian penduduk yang dapat membaca dan menulis kemungkinan bisa menjadi buta huruf lagi jika kemampuan baca tulis tersebut tidak digunakan.
- ❖ Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya indikator Angka Melek Huruf adalah :
 - Jumlah penduduk buta aksara tersebar dalam jumlah yang tidak mencukupi untuk membentuk satu kelompok pembejalaran keaksaraan.
 - Adanya anggapan bahwa pendidikan keaksaraan kurang mampu memberikan bekal untuk mengembangkan ketrampilan yang dapat menjamin warga belajar diterima dipasar kerja.
- ❖ Upaya-upaya yang dapat mendorong tercapainya indikator kinerja Angka Melek Huruf, adalah :
 - Peningkatan layanan bagi penduduk buta aksara usia dewasa yang diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan; pendidikan kesetaraan; dan penguatan lembaga dan satuan pendidikan nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat, dan Sanggar Kegiatan Belajar serta pemberdayaan masyarakat melalui program desaliterasi, desavokasi.
 - Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang dapat dilaksanakan melalui penyediaan insentif bagi dunia usaha/ dunia industry untuk memberikan pelatihan bagi karyawannya, dan penyediaan insentif bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor strategis.
 - Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah, dengan strategi penyelarasan pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp.37.039.912,- atau 80,77% dari total pagu Rp.64.323.123.793,-. Sehingga dari anggaran yang ada terdapat efisiensi dari segi anggaran. Dengan capaian indikator kinerja yang dapat tercapai 95,61 % dan capaian realisasi keuangan 80,77%, menunjukkan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya.

- ❖ Beberapa program yang mendukung urusan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - Program pendidikan anak usia dini,
 - Program pendidikan menengah,
 - Program pendidikan nonformal,
 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,
 - Program manajemen pelayanan pendidikan.
 - Program pendidikan berkelanjutan
 - Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun,
 - Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi di tahun 2016, maka sasaran akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu rata-rata lama sekolah dan persentase angka melek huruf akan dapat tercapai di tahun 2018.



Gambar 3.16 Gedung Arpusdok Kab. Temanggung

Misi Lima

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat.

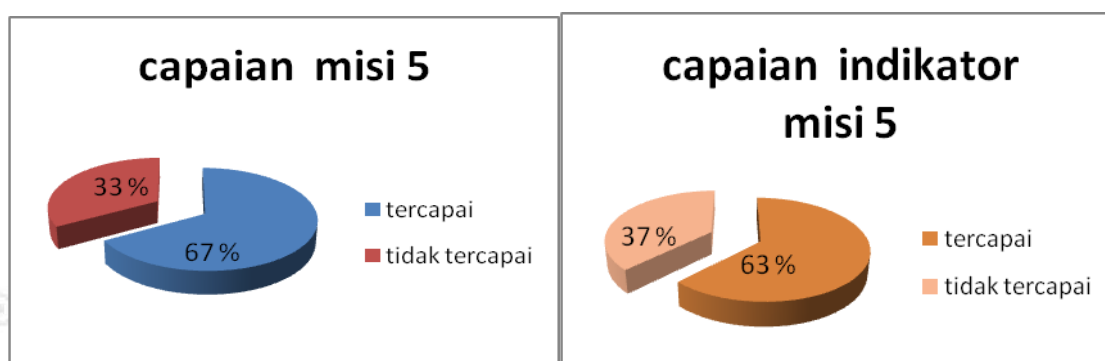
Pada misi V yaitu **Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat** telah didukung dengan 3 sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga
3. Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu

Pencapaian sasaran dan indikator pada misi Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.31

Pencapaian Misi V dan Indikator



Dari 3 sasaran yang ada pada misi V, 66,67% (dua sasaran) telah tercapai sesuai dengan target, sedangkan 33,3% (1 sasaran) telah dilaksanakan tetapi belum tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Untuk indikator pada misi V ini terdapat 8 indikator kinerja dimana 62,5% (5 indikator) telah terlaksana, sedangkan 37,5% (3 indikator) telah dilaksanakan tetapi belum dapat terealisasi sesuai dengan target. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi V adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini telah dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja sebagai berikut :

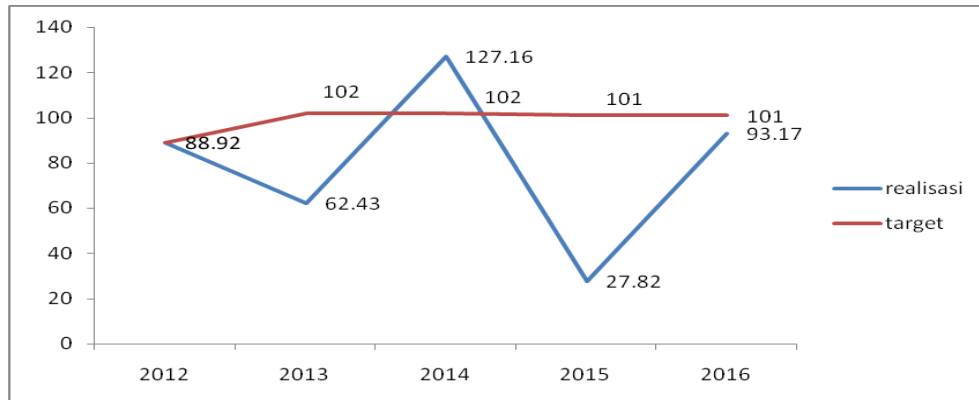
Tabel 3.32
Capaian Kinerja Sasaran 12

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		T	RK	CK	T	RK	CK	T	RK	CK	
1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	102	127,16	75,33	101	27,42	100	101	93,17	107,7	100
2.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	14,11	15,17	92,49	14	16,82	79,86	13	12,7	100,2	11
3.	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	<0,5	0,53	94	<0,5	0,75	50	<0,5	0,3	140	<0,5
4.	Angka harapan Hidup		75,34	-		75,35	-	-	75,27	100*	75,27
Rata-rata capaian sasaran				87,27			76,62			111,9	

Ket. T = Target RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

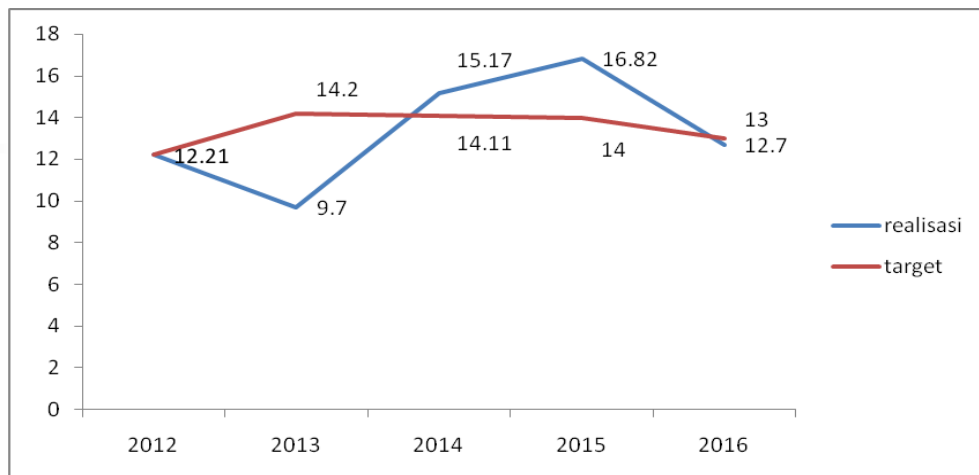
- ❖ Capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** diatas menunjukkan pencapaian 100 % dari 3 indikator sasaran. Pengukuran capaian sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat belum memperhitungkan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) karena data belum dirilis oleh BPS.
- ❖ Dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 (87,27%) dan 2015 (76.62%), capaian kinerja sasaran tahun 2016 ini lebih baik, bisa tercapai optimal pada masing-masing indikator kinerja. Namun demikian beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu:
 - Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, terlihat fluktuatif apabila dilihat dari realisasi selama 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk realisasi di tahun 2016 meningkat tajam jika dibandingkan tahun 2015, meskipun masih dibawah target kabupaten yaitu 101 per 100.000 Kelahiran Hidup. Berikut kami sampaikan target dan realisasi angka kematian ibu di Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.33
 Realisasi Terhadap Target Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
 Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016



- Realisasi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup juga terlihat fluktuatif selama 3 (tiga) tahun terakhir. Realisasi tahun 2016 menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2015, namun hampir mencapai target yang ditetapkan tahun 2016 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.34
 Realisasi Terhadap Target Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
 Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016



- ❖ Adapun alternatif pemecahan masalah yang telah dilakukan adalah melalui :
 - Penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan untuk mencegah kasus abortus.
 - Deteksi dini resiko kehamilan oleh tenaga kesehatan
 - Rujukan kasus resiko tinggi ke fasilitas rujukan (RS, Dokter spesialis kandungan/SpOG).

- Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) untuk Kabupaten/Kota (Permenkes RI No.741/MENKES/PER/VII/2008) dari 2 indikator yang termasuk dalam SPM BK indikator Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia < 24 bulan dari keluarga miskin yang belum mencapai target.
- Permasalahan yang ada dari indikator Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia < 24 bulan dari keluarga miskin adalah karena definisi operasional dari indikator tersebut yang mengharuskan bahan makanan buatan pabrikan, sehingga kegiatan pengadaan di tahun 2016 hanya mampu menyediakan untuk 77,5% anak usia <24 bulan dari keluarga miskin.
- Alternatif solusi atau upaya yang dilaksanakan diantaranya mengusulkan untuk dropping MP-ASI dari Kementerian Kesehatan RI guna memenuhi kekurangan dari pengadaan di Temanggung.
- ❖ Secara keseluruhan dalam rangka mendukung keberhasilan pada sasaran meningkatnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan yang bermutu pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.57.529.378.678,- dengan realisasi sebesar Rp.57.529.378.678,- atau 88,04%.
- ❖ Keberhasilan sasaran ini didukung oleh beberapa program yaitu:
 - Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
 - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Lingkungan Sehat Perumahan
- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi di tahun 2016, maka sasaran akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat perlu upaya keras agar dapat tercapai di tahun 2018.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 35
Capaian Kinerja Sasaran 13

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		T	RK	CK	T	RK	CK	T	RK	CK	
1.	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III	45,57	45,56	100	44,93	45,6	100	45,23	45,6	100,8	45,22
2.	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III Plus	3,23	3,55	100	3,61	3,23	89,47	3,98	3,6	90,45	4,14
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,65	0,96	49,23	0,64	0,93	54,69	0,63	0,98	44,4	0,6
Rata-rata capaian sasaran				83,07			81,39			78,56	

Ket. T = Target RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga**” diatas menunjukkan pencapaian 78,56 % dari 3 indikator sasaran. Indikator kinerja yang capaian kerjanya belum memenuhi target adalah Keluarga Sejahtera III Plus dan Keluarga Sejahtera III Plus, namun realisasi kinerja tahun 2016 pada kedua indikator kinerja tersebut tertinggi selama tiga tahun terakhir. Pembagian keluarga menurut kesejahteraannya ini didasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1992 dengan menggunakan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang umumnya pengetahuannya masih sederhana.
- ❖ Indikator laju pertumbuhan penduduk menjadi penyumbang terbesar rendahnya capaian kinerja misi Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga (44,4%), hal ini menunjukkan masih belum efektifnya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk.
- ❖ Capaian kinerja tahun 2014 (83,07%) meningkat pada tahun 2015 (84,89%), namun turun menjadi 78,28% pada tahun 2016.
- ❖ Secara keseluruhan dalam rangka mendukung keberhasilan pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga yang bermutu pada Tahun 2016

dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.805738.950,- dengan realisasi sebesar Rp.3.520.137.498,- atau 93,07%.

❖ Keberhasilan sasaran ini didukung oleh beberapa program yaitu:

- Program Peningkatan Peran serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- Program pembinaan kesejahteraan keluarga
- Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Program Keluarga Berencana Untuk mendukung program pengendalian penduduk telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3.17 Kegiatan dalam peresmian kampung KB

- ✓ Peresmian kampung KB di 20 kecamatan
- ✓ Pelayanan KB gratis secara masal seperti KB kes Bhayangkara, KB Kes TNI manunggal, Kesatuan gerak PKK, BBGRM
- ✓ Pelayanan KB secara rutin di masing-masing Faskes KB (Puskesmas, Polindes/PKD, Rumah Sakit Pemerintah/ swasta, Dokter/ bidan praktek swasta)
- ✓ Pemberdayaan petugas sampai ke lini terbawah
- ✓ Advokasi kepada stakeholder
- ✓ Menjalin kerjasama dengan mitra kerja
- ✓ Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan tenaga medis melalui pelatihan CTU

❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi di tahun 2016, maka sasaran akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga perlu upaya keras dan mendapatkan perhatian khusus agar dapat tercapai di tahun 2018.

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini telah dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 36
Capaian Kinerja Sasaran 14

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		T	RK	CK	T	RK	CK	T	RK	CK	
1.	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian sasaran				100			100			100	

Ket. T = Target RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

- ❖ Capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan yang Bermutu**” diatas menunjukkan pencapaian 100 % yang berarti bahwa semua penduduk miskin terlayani di RSUD Kabupaten Temanggung meskipun tidak memiliki kartu BPJS karena dapat menggunakan Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT). Jumlah pasien yang ditanggung dana JKT tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37
 Jumlah Pasien yang Dilayani Menggunakan JKT
 Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2016

NO	PELAYANAN	2015	2016
1	Rawat Jalan	1.711	2.438
2	Rawat Inap	1.876	2.504
3	Kontrasepsi KB Mantap Medis Operatif Wanita (MOW)	98	55
JUMLAH		3.685	3.998

Secara keseluruhan terdapat peningkatan sebesar 7,8% penduduk miskin yang dilayani menggunakan JKT meskipun pada pelayanan Kontrasepsi KB Mantap Medis Operatif Wanita (MOW) terdapat penurunan.

Meningkatnya kunjungan rawat jalan penduduk maskin yang dilayani menggunakan JKT mempengaruhi kinerja *Turn of Interval (TOI)* yaitu rata-rata lama tempat tidur tidak ditempati. Capaian indikator kinerja TOI pada tahun 2016 sebesar 1,30 hari, di bawah target 2 hari. Tingginya pemanfaatan tempat tidur

rumah sakit menunjukkan rata-rata lama tempat tidur tidak ditempati semakin rendah. Hal ini menuntut RSUD Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan sarana prasarana sesuai dengan standar termasuk penambahan tempat tidur.

- ❖ Secara keseluruhan dalam rangka mendukung keberhasilan pada sasaran meningkatnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan yang bermutu pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.194.605.710,- atau 99,90%.
- ❖ Keberhasilan sasaran ini didukung oleh beberapa program yaitu:
 - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 - Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 - Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
 - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD
 - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengembangkan RSUD 7 lantai dan dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dan memadai.

Puskesmas sebanyak 25 yang tersebar di 20 Kecamatan telah melakukan akreditasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan di Tahun 2017 telah menerapkan system BLUD



Gambar 3.18 Gedung 7 lantai RSUD Kab. Temanggung

Misi Enam

Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik.

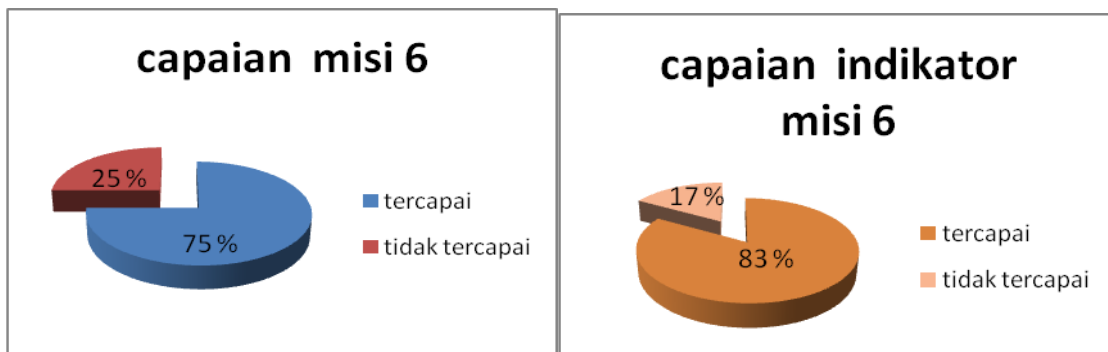
Pada misi VI yaitu **Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik** telah didukung dengan 4 sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dan Desa Serta Lembaga Pemerintah
2. Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4. Terwujudnya Pengelolaan E-Government

Pencapaian sasaran dan indikator pada misi VI dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.38

Pencapaian Misi VI dan Indikator



Dari 4 sasaran yang ada pada misi VI, 75 % (3 sasaran) telah tercapai sesuai dengan target, sedangkan 25 % (1 sasaran) telah dilaksanakan tetapi belum tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Untuk indikator pada misi VI ini terdapat 6 indikator kinerja dimana 83 % (5 indikator) telah terlaksana, sedangkan 17 % (1 indikator) telah dilaksanakan tetapi belum dapat terealisasi sesuai dengan target.

Upaya untuk mencapai misi keenam Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik tergambar dalam capaian sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran 15

SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dan Desa Serta Lembaga Pemerintah											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B (60)	CC (53,75)	89,58	B (60)	C (46)	77,4	B (60)	CC (51,46)	85	B
2.	Nilai EKPPD	Sangat tinggi	Sangat tinggi	100	Sangat tinggi	Sangat tinggi	100	Sangat tinggi	Sangat tinggi *	100*	Sangat tinggi
Rata-rata capaian sasaran				94,79			88,7			92,4	

Ket. TK= Target Kinerja; RK = Realisasi Kinerja; CK = Capaian Kinerja

*Masih dalam proses penilaian pemerintah pusat, dirilis pada peringatan hari OTDA.

- ❖ Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis “**Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dan Desa Serta Lembaga Pemerintah**” pada tahun 2016 sebesar 92,4%, secara umum dapat dikatakan baik. Hal yang mendorong tingginya persentase capaian kinerja sasaran strategis ini antara lain pada capaian untuk indikator Nilai EKPPD sebesar 100%, sedangkan untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah masih belum tercapai atau hanya sebesar 85%.
- ❖ Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2016 telah memperoleh nilai 51,46 atau kategori CC.

Jika dilihat dari capaian kinerjanya maka capaian nilai SAKIP tahun 2016 yaitu CC (nilai 51) dibagi target di tahun 2016 yaitu B (nilai 60), sehingga diperoleh capaian kinerja 85%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 5 poin. Beberapa unsur penilaian dalam LKjIP telah mengalami kenaikan baik dari segi perencanaan, pengukuran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Jika dilihat target akhir RPJMD, maka untuk SAKIP ini perlu upaya keras untuk mencapai nilai B (nilai 60).

Pada tahun 2015 Untuk indikator Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, disebabkan kelemahan di dokumen Perencanaan karena masih cukup banyak indikator di RPJMD dan Renstra SKPD yang hanya berorientasi pada output bukan berorientasi pada outcome. Namun demikian kelemahan tersebut telah dilakukan upaya perbaikan pada RPJMD tahun 2013

s/d 2018 dan Renstra tahun 2014 s/d 2018 dengan melakukan perubahan yang direncanakan pada pertengahan Tahun 2016

solusi untuk meningkatkan Capaian Kinerja :

- koordinasi dinas / instansi terkait ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN).
- menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB.

❖ Indikator Kinerja Nilai EKPPD.

Jika dilihat dari capaian kinerjanya maka capaian nilai Indikator Kinerja Nilai EKPPD tahun 2016 yaitu 100%, mencapai nilai sangat tinggi (nilai 3,01-4). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kabupaten Temanggung telah mendapat nilai sangat tinggi sejak tahun 2012.



Gambar 3.19 Skoring penilaian EKPPD

Penilaian kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan cara menghitung dan menilai (*scoring*) total indeks komposit terhadap 2 variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja (95%) dan Indeks Kesesuaian Materi (5%).

EKPPD terhadap LPPD, dilakukan dgn menggunakan cara *Desk Evaluation* dan *Common Sense Survey* (verifikasi lapangan).

- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran di atas, adalah sebesar Rp. 28.640.000.188,- atau 91,13% dari total pagu sebesar Rp. 32.858.471.100,-. Dengan capaian indikator kinerja yang dapat tercapai 92,42 % dan capaian realisasi keuangan 91,13%, menunjukkan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya.
- ❖ Sasaran Strategis “Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dan Desa Serta Lembaga Pemerintah” di capai dengan melaksanakan program :
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Program perencanaan pembangunan daerah

- Program Penelitian dan Pengembangan
- Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program penelitian dan pengembangan
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- Program Kerjasama Daerah
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- Program Pendidikan Kedinasan
- Program administrasi kepegawaian
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Untuk mencapai target sasaran ini Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- ✓ Melakukan kerjasama dengan BPKP dalam mereviu baik LKjIP maupun LKPD
 - ✓ Menggunakan system aplikasi untuk memperoleh data/ laporan yang valid
 - ✓ Melakukanevaluasi terhadap tupoksi di masing-masing SKPD yang tumpang tindih
 - ✓ Membuat Roadmap Reformasi Birokrasi sebagai acuan menuju pemerintah yang bersih dan akuntabel
 - ✓ Meningkatkan pelayanan public dengan menetapkan beberapa SKPD menjadi SKPD yang bebas korupsi dan wilayah bersih bebas melayani
- ❖ Dengan capaian kinerja yang telah tercapai 100% di tahun 2016, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu **“Meningkatnya Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dan Desa Serta Lembaga Pemerintah”** perlu upaya keras agar dapat tercapai di tahun 2018.

2. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini telah dilakukan komparasi dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran 16

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1.	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP
Rata-rata capaian sasaran				100			100			100	

Ket. TK= Target Kinerja; RK = Realisasi Kinerja; CK = Capaian Kinerja

- ❖ Realisasi kinerja indikator pada sasaran **“meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah”** dalam dua tahun berturut-turut dapat tercapai sesuai dengan target.
- ❖ Pada Indikator kinerja “Opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)” dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dapat terealisasi sesuai target yaitu Kabupaten Temanggung mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga tercapai 100%.

Hal tersebut artinya di Kabupaten Temanggung sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan, dan secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP Maka pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah digunakan sumber daya keuangan sebesar Rp.8.567.253.184,- dari total anggaran sebesar Rp.9.585.537.720,- atau sebesar 84,23%. Jika dibandingkan capaian sasaran yang tercapai 100% dan realisasi keuangan yang terealisasi 84,23% maka terdapat efisiensi sumberdaya.

- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh beberapa program yaitu:
 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
 - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

❖ Untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan akan membangun sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sehingga lebih efektif dan efisien.



Gambar 3.20 Penyerahan Opini WTP

❖ Dengan capaian kinerja yang telah tercapai 100% di tahun 2016, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu **“meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah”** diperkirakan dapat tercapai di tahun 2018.

3. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengetahui capaian kinerja pada sasaran ini telah dilakukan pengukuran indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.41

Capaian Kinerja Sasaran 17

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	75	100	75	75	100	75	75	100	100
2.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian sasaran				100			100			100	

Ket. TK = Target Kinerja RK = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja

❖ Capaian kinerja indikator pada **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** ini dapat tercapai sesuai target, yang ditetapkan. rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2016 sebesar 100% dengan kategori **“baik”**..

- ❖ Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah tercapai 100% sesuai dengan target. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2016 telah dilaksanakan pada 150 satuan pendidikan baik SD, SMP, dan SMA. Jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2015, realisasi kinerja indikator ini masih sama yaitu mendapatkan indeks B. Namun jika dilihat dari SKPD yang melakukan survey, jumlahnya meningkat lebih banyak.
- ❖ Prosentase penanganan pengaduan masyarakat 100 %. Semua pengaduan ditanggapi dan dilayani untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pengaduan dari tahun ketahun semakin meningkat, Tahun 2014 ada 3 pengaduan, Tahun 2015 ada 669 pengaduan, Tahun 2016 ada 1289 pengaduan. Hal tersebut menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga perlu perbaikan menyeluruh terhadap semua jenis pelayanan yang ada. Pengaduan dimaksud secara umum ditujukan kepada Organisasi Pemerintah Daerah diantaranya:
 - ✓ Dinas Pekerjaan Umum
 - ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - ✓ Badan Lingkungan Hidup
 - ✓ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 - ✓ Dinas Kesehatan
 - ✓ Dinas Sosial
 - ✓ Dinas Pendidikan
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran diatas, adalah sebesar Rp. 97.095.249.533,- atau 67,93 % dari total pagu sebesar Rp. 109.498.603.314,- Hal tersebut berarti terdapat efisiensi pengurangan sumberdaya keuangan dari pagu yang ditentukan. Dengan capaian indikator kinerja yang dapat tercapai 100 % dan capaian realisasi keuangan 67,93%, menunjukkan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya.
- ❖ Untuk mendukung sasaran ini, telah dilaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan disektor public diantaranya:
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Program peningkatan disiplin aparatur
 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - Program pelayanan administrasi perkantoran
 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Bagi warga masyarakat Temanggung bisa memberikan kritik dan saran yang membangun secara langsung dan mudah melalui:

- website resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung
- SMS gateway
- Lapor SP4N
- Media social lainnya
- Menulis pada kotak saran yang tersedia di semua SKPD

Untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat seperti pelayanan kependudukan, pajak, maupun perizinan sudah menggunakan system aplikasi, sehingga pelayanan dilakukan dengan cepat dan data yang akurat.

- ❖ Dengan capaian kinerja yang sudah terealisasi 100 % di tahun 2016, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** harus dipertahankan agar target yang ditetapkan pada tahun 2018 dapat tercapai.

18. Sasaran Strategis : Terwujudnya pengelolaan e-Government

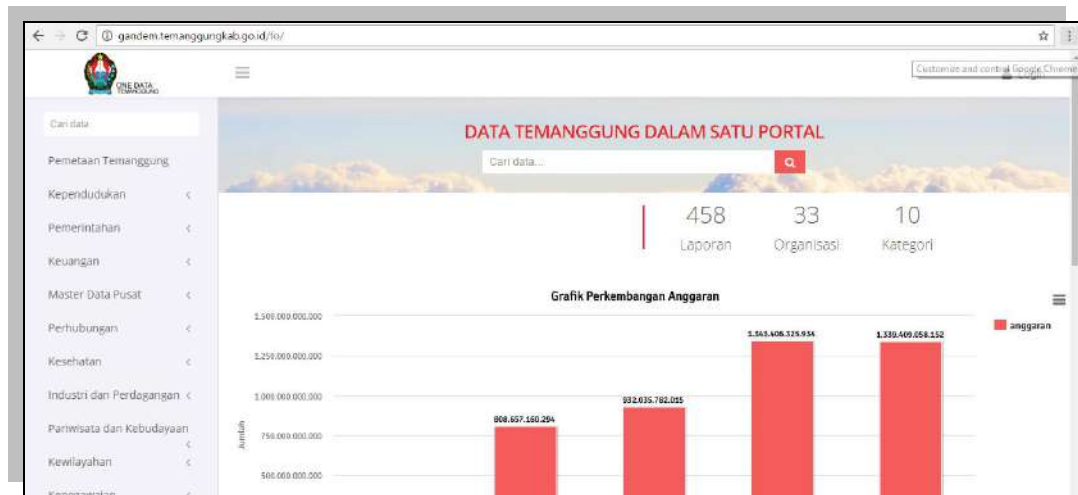
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 18, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Sasaran 18

SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya pengelolaan e-Government											
INDIKATOR KINERJA		2014			2015			2016			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1.	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	15	15	100	35	20	57	55	55	100	100
Rata-rata capaian sasaran				100			57			100	

Ket : TK=Target Kinerja, RK = Realisasi Kinerja , CK = Capaian Kinerja

- ❖ Target kinerja sasaran **“terwujudnya pengelolaan e-Government”**, dengan indikator kinerja cakupan jaringan sistem informasi e-Government tercapai 100% (dari target 55 % terealisasi 100%), tercapai lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2015 yang hanya mencapai 57%.



Gambar : 3.21 Tampilan aplikasi Informasi Data Terpadu Kab. Temanggung

- ❖ Pencapaian target kinerja sasaran sudah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Aplikasi sistem informasi e-government yang dibangun/dikembangkan baik oleh SKPD/Unit Kerja maupun dari Pemerintah Pusat dan Provinsi telah mencakup seluruh SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa. Pada tahun 2016 ini juga telah dikembangkan Data Center melalui sistem informasi pusat data terpadu (gandem.temanggungkab.go.id). Daftar Aplikasi Sistem Informasi e-Government yang tersedia meliputi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagai berikut:

Tabel 3.43

Tabel Aplikasi e-Government Kabupaten Temanggung

No	Aplikasi	Fungsi	SKPD/Unit Kerja	Tipe
1	2	3	4	5
1	Website Portal Kabupaten Temanggung (temanggungkab.go.id)	Portal Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	Bagian Humas, Setda	G2C
2	sms Gateway Kabupaten Temanggung (sms.temanggungkab.go.id)	Pelayanan pengaduan masyarakat melalui sms	Bagian Humas, Setda	G2C
3	jdih.temanggungkab.go.id	Informasi Peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum, Setda	G2C
4	ppid.temanggungkab.go.id	Pelayanan Informasi Publik	Dishubkominfo	G2C
5	Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Terpadu (gandem.temanggungkab.go.id) dan sifo pusdat (mobile app)	Pusat informasi data terpadu (integrasi data)	Dishubkominfo	G2C
6	SIM PKB	Pelayanan PKB	Dishubkominfo	G2C

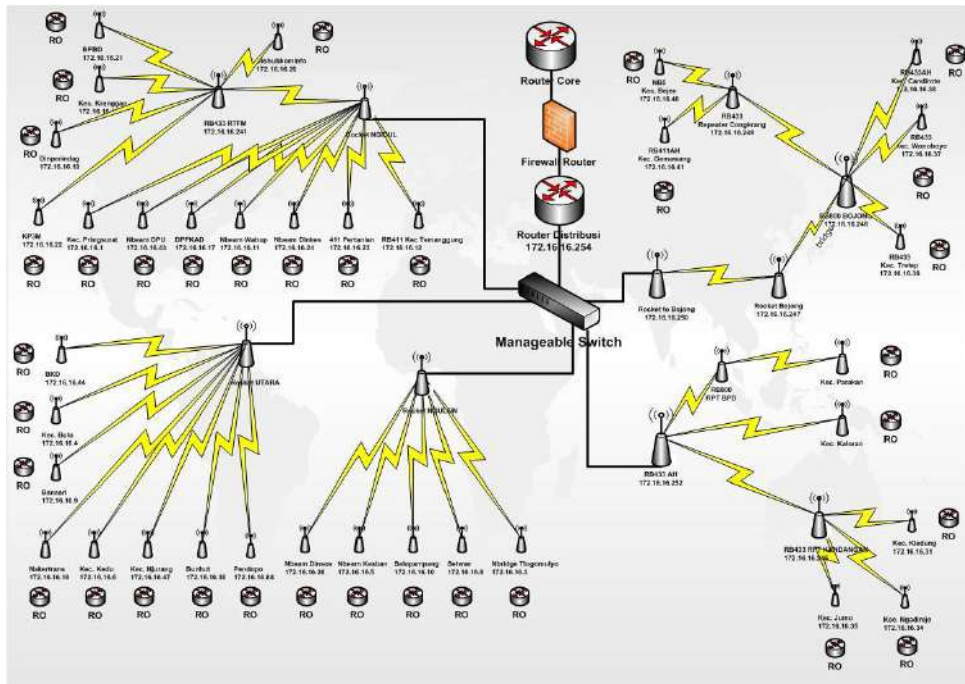
No	Aplikasi	Fungsi	SKPD/Unit Kerja	Tipe
7	SIM Angkutan	Pelayanan Pengelolaan data dan Pelayanan Angkutan	Dishubkominfo	G2C
8	Aplikasi KTP-el	Pelayanan KTP elektronik	Dindikcapil	G2C
9	Sistem aplikasi pelayanan Kependudukan	Pelayanan Kependudukan (KK,KTP,NA, Surat menyurat, monografi)	Dindikcapil	G2C
10	Aplikasi Pemutakhiran penduduk	Pemutakhiran data penduduk	Dindikcapil/Desa	G2C
11	sms center capil	Pelayanan dan pengaduan masyarakat melalui sms	Dindikcapil	G2C
12	perijinan.temanggungkab.go.id	Informasi dan Pelayanan Perizinan online	KP3M	G2C
13	SIMTAP	Pengelolaan Data Pelayanan Perizinan	KP3M	G2C
14	bankdata.temanggungkab.go.id	Informasi data pembangunan	Bappeda	G2C
15	sipd.temanggungkab.go.id	Informasi profil daerah	Bappeda	G2C
16	Website Badan/Dinas/Kantor	Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	SKPD	G2C
17	Website Kecamatan	Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	20 Kecamatan	G2C
18	Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Informasi dan Pelayanan Perizinan Kecamatan	20 Kecamatan	G2C
19	Website Desa	Informasi dan komunikasi dengan masyarakat	266 Desa	G2C
20	Anjungan Informasi Kepegawaian	Informasi kepegawaian untuk masyarakat	BKD	G2C
21	lpse.temanggungkab.go.id	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah online	Bagian Pembangunan, Setda	G2B
22	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	Merencanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa	Bagian Pembangunan, Setda	G2B
23	Sistem Informasi Pengendalian dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi (postel.temanggungkab.go.id)	Pelayanan permohonan rekomendasi Cell Plan untuk pendirian menara telekomunikasi	Dishubkominfo	G2B
24	musrenbang.temanggungkab.go.id	Pengolahan data hasil Musrenbang	Bappeda	G2B
25	Aplikasi Analisis Kemiskinan	Pengolahan data RTM	Bappeda	G2B
26	Aplikasi Mapatda	Pengelolaan data Pendapatan Daerah dari sektor pajak	DPPKAD	G2B
27	Sistem akuntansi keuangan Daerah (SIKAD)	sistem akuntansi berdasar akrual	DPPKAD/SKPD/Unit Kerja	G2G
28	Aplikasi Anggaran	Penyusunan anggaran (RKA, DPA, APBD)	DPPKAD/SKPD/Unit Kerja	G2G
29	Aplikasi Barang Daerah (simbada.temanggungkab.go.id)	Pencatatan Barang Daerah	DPPKAD/SKPD/Unit Kerja	G2G
30	Aplikasi Penatausahaan Keuangan	sistem Pembukuan keuangan	DPPKAD/SKPD/Unit Kerja	G2G
31	sismiop.temanggungkab.go.id	Pengelolaan data PBB P2	DPPKAD	G2G
32	Aplikasi PBB	Pengelolaan Pembayaran PBB Kelurahan / Desa	DPPKAD/Kec/Kel/Desa	G2G
33	SimGaji	Pengelolaan gaji pegawai	DPPKAD	G2G

No	Aplikasi	Fungsi	SKPD/Unit Kerja	Tipe
34	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan daerah (sibangda.temanggungkab.go.id)	Melaporkan kegiatan maupun program semua SKPD setiap bulan	Bagian Pembangunan Setda	G2G
35	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (simpeda.temanggungkab.go.id)	Untuk perencanaan kerja, Renstra SKPD	Bappeda	G2G
36	GIS RTRW	Peta RTRW	Bappeda	G2G
37	Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG e-personal, SIMPEG SKPD)	Pengelolaan data kepegawaian	BKD	G2G
38	SKP dan Penilaian Kerja Pegawai (p2kp.temanggungkab.go.id)	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	BKD	G2G
39	Aplikasi absensi online (absensi.temanggungkab.go.id)	Pengelolaan absen dan tunjangan pegawai online	BKD	G2G
40	Aplikasi jabatan fungsional (e-fungsional)	Pengelolaan data jabatan fungsional	BKD	G2G
41	PCAP system	Mengetahui data PCAP	BKD	G2G
42	Aplikasi Pelayanan Satu Pintu	Pelayanan kepegawaian satu pintu	BKD	G2G
43	Aplikasi Pelayanan Keterangan dan Ijin Belajar (Sikejar)	Pelayanan Keterangan dan Ijin Belajar	BKD	G2G
44	Aplikasi Penyusunan Formasi Pegawai (e-formasi)	Penyusunan Formasi Pegawai	BKD	G2G
45	Aplikasi pengelolaan data Diklat Pegawai (e-diklat)	Pengelolaan data Penghargaan Diklat Pegawai	BKD	G2G
46	Sisfo Setyalencana	Pengelolaan data Penghargaan Pegawai	BKD	G2G
47	Aplikasi Pengelolaan kasus pegawai (e-Kasus)	Pengelolaan data kasus pegawai	BKD	G2G
48	Aplikasi Baperjakat	Pengolahan data bahan Bapperjakat	BKD	G2G
49	e-Filling	Pengelolaan Dokumen File Pegawai	BKD	G2G
50	Simpedes	Pengolahan data Perangkat Desa	Bagian Pemdes Setda	G2G
51	Sistem Informasi Pelaporan Terpadu	pelaporan dari Puskesmas setiap bulan	Dinkes	G2G
52	Sistem tanaman pangan	data bese tanaman pangan	Dintanbunhut	G2G
53	Sistem informasi pangan strategis	data bese tanaman pangan	Dintanbunhut	G2G
54	Sistem Informasi statistik holtikultura	Pengolahan data statistik holtikultura	Dintanbunhut	G2G
55	surya.temanggungkab.go.id	Surat Online	Bag. Santel PDE Setda	G2G
56	diya.temanggungkab.go.id	Disposisi online	Bag. Santel PDE Setda	G2G
57	kantaya.temanggungkab.go.id	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan komunikasi antar Kantor secara maya	Bag. Santel PDE Setda	G2G
58	simonit.temanggungkab.go.id	Monitoring Kegiatan Bantuan Keuangan	Bapermades	G2G
59	tpp.temanggungkab.go.id	Pengelolaan TPP berdasar Kelas Jabatan	Bagian Ortala Setda	G2G
60	kinerja.temanggungkab.go.id	Pengelolaan kinerja harian pegawai	Bagian Ortala Setda	G2G
61	Aplikasi Perhitungan Neraca Bahan Makanan	Perhitungan Neraca Bahan Makanan	KKP	G2G
62	Aplikasi Pemetaan SKPG	Pemetaan SKPG	KKP	G2G
63	Aplikasi Pemetaan Rawan Pangan	Pemetaan Rawan Pangan	KKP	G2G
64	Aplikasi Pola Pangan Harapan (PPH)	Data Pola Pangan Harapan (PPH)	KKP	G2G
65	SIM TP	Pengolahan data statistik Ketahanan Pangan	KKP	G2G
66	Sistem Keudes	Pengelolaan dan pelaporan keuangan Desa	Desa	G2G

No	Aplikasi	Fungsi	SKPD/Unit Kerja	Tipe
67	Aplikasi Profil Desa	penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan	Bapermades/Desa	G2G
68	SIM Perlengkapan Jalan	Pelayanan Pengelolaan data Perlengkapan Jalan	Dishubkominfo	G2G
69	SIDALMENTEL	Pengendalian Menara telekomunikasi	Dishubkominfo	G2G
70	Dapodik	Data Pokok Pendidik	Dinas Pendidikan	G2G
71	SIAK Konsolidasi	Konsolidasi data penduduk	Dindukcapil/Desa	G2G
72	SIMWAS	Manajemen Informasi pengawasan	Inspektorat	G2G
73	Arsip digital	Digitalisasi arsip	Kanarpusdok	G2G
74	Otomasi Perpustakaan Slim 7 Cendana	Pelayanan perpustakaan daerah	Kanarpusdok	G2G
75	Aplikasi SENAYAN	Manajemen perpustakaan	Kanarpusdok	G2G
76	SPIPISE	Pengolahan data penanaman modal	KP3M	G2G
77	Aplikasi pendataan industri kecil dan menengah menengah	pendataan industri kecil dan menengah menengah	Disperindagkop dan UMKM	G2G
78	SIAKtoAFis	sinkronisasi data SIAK dan e-KTP	Dindukcapil	G2G
79	SIMRS/Billing System	Pelayanan pasien	RSUD	G2G
80	Sistem Informasi PMKS dan PSKS	Pengolahan data PMKS dan PSKS	Dinas Sosial	G2G
81	GIS Pertanian	Informasi data spasial Pertanian	Dintanbunhut	G2G
82	SimDPU	Portal Sistem Informasi DPU (Surat, Database Jalan, PJU, Irigasi, Kontrol Pembayaran, Kontrol Kemajuan Proyek, Daftar Pekerjaan, Kontrak, Pelayanan DPU)	DPU	G2G
83	SIM Perparkiran	Pengelolaan data parkir	Dishubkominfo	G2G
84	Aplikasi Ketenagakerjaan	Mengetahui Tingkat pengangguran penduduk	Disnakertrans	G2E
85	Aplikasi kartu AK-1 dan database pencari kerja	Pelayanan Kartu Pencari Kerja	Disnakertrans	G2E
86	Aplikasi pendaftaran dan peserta pelatihan	DB pendaftar dan peserta pelatihan	Disnakertrans	G2E
87	Bursa kerja online	Informasi lowongan kerja	Disnakertrans	G2E

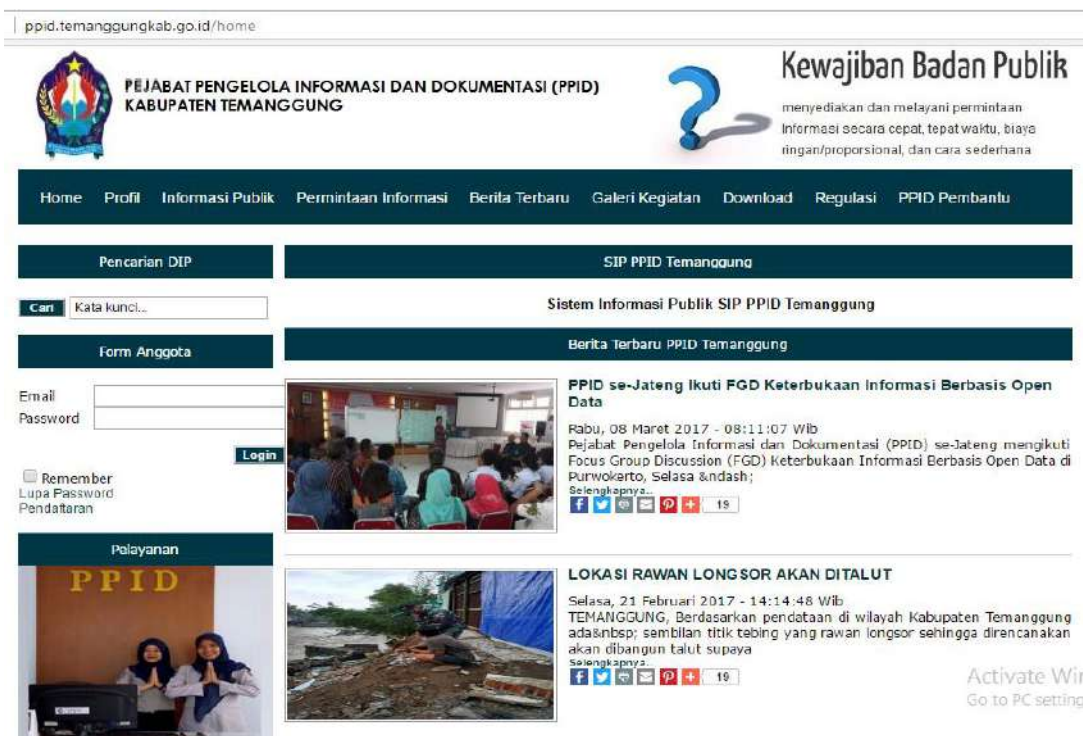
Ket : G2C=Government to Citizen, G2B=Government to Business, G2G=Government to Government, G2E=Government to employees

- ❖ Pembangunan pusat jaringan online e-Government dalam mendukung integrasi aplikasi sistem informasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan SKPD teknis dan pelayanan publik. Berikut rencana pengembangan topologi jaringan online e-Government Pemerintah Kabupaten Temanggung:



Gambar : 3.22 Pengembangan Topologi Jaringan Intranet (WLAN) Pemda Temanggung

- ❖ Penggunaan anggaran sumberdaya keuangan dalam mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 12.847.385.933,- dari total anggaran yang sediakan sebesar Rp. 13.615.503.300,- atau terserap sebanyak 95,05%. Dengan capaian indikator kinerja yang dapat tercapai 100 % dan capaian realisasi keuangan 95,05%, menunjukkan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya.
- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung dengan program sebagai berikut:
 - Program Pengembangan data/informasi
 - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
 - Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi



Gambar 3.23 PPID Kabupaten Temanggung

- ❖ Dengan capaian kinerja yang telah mencapai 100 % di tahun 2016, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya pengelolaan e-Government”, akan dapat tercapai di tahun 2018.

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan dapat dilihat untuk total anggaran belanja urusan wajib dan urusan pilihan sebesar Rp. 797.012.460.583,- (terdiri dari belanja pegawai, barang/jasa dan modal) yang terealisasi sebesar Rp. 721.495.403.460,- atau 90,52%.

Berikut adalah data realisasi anggaran pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan pada tahun 2016, yang dapat menggambarkan besarnya anggaran dan realisasi guna mewujudkan sasaran strategis RPJMD pada tahun 2016.

Tabel 3.44

**Anggaran Belanja, Realisasi,
dan Pelaksana Urusan Wajib Tahun 2016**

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				%	SKPD
	Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah		
	Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
URUSAN WAJIB	43,593,263,845.00	300,213,571,365.00	412,077,201,913.00	755,884,037,123.00	38,565,255,835.00	263,262,992,877.00	384,114,233,513.00	685,942,482,225.00	90.75	
PENDIDIKAN	11,891,532,950.00	24,174,600,500.00	29,845,435,693.00	65,911,569,143.00	10,090,731,750.00	7,598,241,507.00	20,811,954,390.00	38,500,927,647.00	58.41	Dinas Pendidikan
KESEHATAN	5,836,454,000.00	145,581,117,343.00	135,113,058,798.00	286,530,630,141.00	4,811,131,045.00	140,203,063,058.00	132,222,955,203.00	277,237,149,306.00	96.76	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum
PERUMAHAN	647,171,000.00	349,915,500.00	4,414,548,200.00	5,411,634,700.00	631,728,500.00	301,729,005.00	4,082,949,112.00	5,016,406,617.00	92.70	Dinas Pekerjaan Umum
PENATAAN RUANG	21,830,000.00	105,441,000.00	0.00	127,271,000.00	21,830,000.00	103,886,550.00	0.00	125,716,550.00	98.78	
PEKERJAAN UMUM	4,673,235,000.00	14,986,917,400.00	138,114,543,450.00	157,774,695,850.00	4,132,517,450.00	12,673,468,836.00	132,417,746,509.00	149,223,732,795.00	94.58	
PERTANAHAN	68,435,000.00	274,253,500.00	19,031,074,500.00	19,373,763,000.00	61,375,000.00	206,264,030.00	16,864,123,167.00	17,131,762,197.00	88.43	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1,385,574,900.00	7,698,332,700.00	453,255,000.00	9,537,162,600.00	1,272,584,400.00	6,974,800,963.00	433,932,588.00	8,681,317,951.00	91.03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
STATISTIK	359,343,400.00	714,737,600.00	30,040,000.00	1,104,121,000.00	334,379,900.00	650,997,150.00	28,221,393.00	1,013,598,443.00	91.80	
PERHUBUNGAN	485,995,000.00	2,402,201,400.00	1,656,988,000.00	4,545,184,400.00	478,393,000.00	2,348,394,055.00	1,614,900,750.00	4,441,687,805.00	97.72	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
KOMUNIKASI INFORMATIKA dan	897,552,500.00	2,986,572,800.00	8,598,689,000.00	12,482,814,300.00	831,310,000.00	2,707,175,077.00	8,266,782,413.00	11,805,267,490.00	94.57	
LINGKUNGAN HIDUP	1,475,578,500.00	6,759,357,300.00	9,171,736,500.00	17,406,672,300.00	1,342,191,000.00	5,720,344,748.00	8,993,359,059.00	16,055,894,807.00	92.24	Badan Lingkungan Hidup
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	75,497,000.00	612,295,150.00	0.00	687,792,150.00	54,690,000.00	539,360,653.00	0.00	594,050,653.00	86.37	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	574,555,000.00	1,766,067,400.00	1,664,251,400.00	4,004,873,800.00	559,926,500.00	1,553,391,979.00	1,645,116,700.00	3,758,435,179.00	93.85	
SOSIAL	627,274,000.00	2,667,048,525.00	837,630,000.00	4,131,952,525.00	559,087,600.00	2,313,963,031.00	819,027,025.00	3,692,077,656.00	89.35	Dinas Sosial
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	786,528,000.00	1,213,833,400.00	7,058,278,433.00	9,058,639,833.00	727,315,500.00	1,075,040,766.00	4,742,211,082.00	6,544,567,348.00	72.25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				%	SKPD
	Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah		
	Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
KETENAGAKERJAAN	351,732,000.00	1,526,720,835.00	3,315,202,000.00	5,193,654,835.00	330,518,000.00	1,282,989,344.00	3,232,843,000.00	4,846,350,344.00	93.31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	16,548,000.00	224,302,100.00	121,800,000.00	362,650,100.00	16,011,000.00	204,966,518.00	121,575,000.00	342,552,518.00	94.46	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
PENANAMAN MODAL	453,774,000.00	1,193,559,825.00	341,511,000.00	1,988,844,825.00	295,608,832.00	1,084,307,310.00	163,747,250.00	1,543,663,392.00	77.62	Kantor Penanaman Modal
KEBUDAYAAN	637,079,000.00	3,128,933,500.00	131,400,000.00	3,897,412,500.00	580,665,000.00	2,686,299,145.00	128,450,000.00	3,395,414,145.00	87.12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	151,521,000.00	927,928,900.00	15,610,887,700.00	16,690,337,600.00	125,615,000.00	806,681,083.00	14,502,984,692.00	15,435,280,775.00	92.48	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	960,355,000.00	8,474,701,675.00	9,065,245,000.00	18,500,301,675.00	879,819,000.00	7,844,162,691.00	8,929,501,625.00	17,653,483,316.00	95.42	Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	9,278,820,595.00	66,957,273,432.00	26,834,914,239.00	103,071,008,266.00	8,572,080,358.00	59,332,872,048.00	23,438,300,855.00	91,343,253,261.00	88.62	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,445,370,000.00	3,298,740,880.00	81,505,000.00	4,825,615,880.00	1,403,706,000.00	3,087,262,290.00	78,230,000.00	4,569,198,290.00	94.69	Bapermades
KEARSIPAN	74,800,000.00	437,366,000.00	214,668,000.00	726,834,000.00	59,875,000.00	385,037,895.00	207,816,800.00	652,729,695.00	89.80	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
PERPUSTAKAAN	313,713,000.00	230,628,600.00	361,540,000.00	905,881,600.00	295,081,000.00	199,309,382.00	359,004,900.00	853,395,282.00	94.21	

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				%	SKPD
	Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah		
	Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
URUSAN PILIHAN	4,705,788,000.00	17,694,883,500.00	18,727,751,960.00	41,128,423,460.00	3,951,937,100.00	16,723,247,755.00	14,877,736,380.00	35,552,921,235.00	86.44	
PERTANIAN	1,544,935,000.00	10,088,600,950.00	12,083,707,000.00	23,717,242,950.00	1,338,520,000.00	9,697,799,906.00	11,122,751,850.00	22,159,071,756.00	93.43	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Pelaksana Penyuluhan
KEHUTANAN	107,055,000.00	1,096,290,250.00	0.00	1,203,345,250.00	102,355,000.00	1,084,035,250.00	0.00	1,186,390,250.00	98.59	
KELAUTAN DAN PERIKANAN	48,400,000.00	2,121,353,000.00	43,457,000.00	2,213,210,000.00	43,380,000.00	2,030,490,950.00	42,447,000.00	2,116,317,950.00	95.62	Dinas Perikanan dan Peternakan
PARIWISATA	133,065,000.00	1,166,225,500.00	0.00	1,299,290,500.00	105,475,000.00	1,125,523,200.00	0.00	1,230,998,200.00	94.74	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
PERDAGANGAN	456,219,000.00	1,397,749,350.00	6,290,109,960.00	8,144,078,310.00	364,204,100.00	1,105,764,292.00	3,494,430,530.00	4,964,398,922.00	60.96	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
PERINDUSTRIAN	2,414,854,000.00	1,625,924,450.00	310,478,000.00	4,351,256,450.00	1,996,743,000.00	1,533,349,604.00	218,107,000.00	3,748,199,604.00	86.14	
TRANSMIGRASI	1,260,000.00	198,740,000.00	0.00	200,000,000.00	1,260,000.00	146,284,553.00	0.00	147,544,553.00	73.77	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
JUMLAH TOTAL	48,299,051,845.00	248,499,182,416.00	344,075,911,200.00	641,590,947,316.00	42,517,192,935.00	279,986,240,632.00	398,991,969,893.00	721,495,403,460.00	112.45	

Sumber Data: DPPKAD Kab. Temanggung Tahun 2016 (unaudited)

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Secara umum, pemerintah Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sasaran yang berjumlah 18 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung tahun 2016 sebagian besar telah direalisasikan dengan rata-rata 97,7 % atau dengan kategori “**sangat baik**”.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 sasaran dapat disimpulkan bahwa 17 sasaran (94,4%) tercapai dengan predikat “sangat baik”, dan 1 sasaran (5,6%) tercapai dengan predikat “baik”. Dari 18 sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 28 indikator kinerja dengan capaian 26 indikator kinerja atau 92,8 % dengan kategori sangat baik, 2 indikator kinerja atau 7,2 % dengan kategori baik.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 755.884.037.123,- jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp 685.942.482.225,- atau 90,7% (un audit per tanggal 1 Maret 2016).

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2016 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Temanggung akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2016 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja pada tahun mendatang.

Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari

pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung atas hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukannya reviu terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung 2013-2018.
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang perencanaan dan evaluasi sehingga pelaporan LKjIP telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
3. Membangun sistem e_SAKIP yang terintegrasi antara perencanaan dan pelaporan pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.
4. Untuk monitoring pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan rapat koordinasi pengendalian pembangunan dan rakor pimpinan kepala SKPD
5. Perjanjian kinerja tidak hanya dilakukan antara Bupati dengan Pimpinan SKPD tetapi sudah dilakukan antara pimpinan SKPD dengan pejabat struktural di bawahnya sampai dengan eselon IV
6. Meningkatkan transparansi penerapan manajemen kinerja

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 ini. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018, khususnya tahun 2016 yang juga dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2016 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator maupun sasaran yang belum memenuhi sesuai dengan target, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dimasa yang akan datang capaian kinerja akan lebih baik.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
www.temanggungkab.go.id



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016



2017



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2014 merupakan tahun pertamapelaksanaan draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2015. Pada tahun anggaran 2014, telah dilaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung.

Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki pada 5 (lima) tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Sumber Daya Manusia, Pengawasan, dan Akuntabilitas

Berdasarkan penilaian sendiri (Self assessment) atas realisasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2014, capaian kinerja tahun 2014 dapat ditunjukkan melalui capaian rata-rata kinerja sasaran berdasarkan beberapa Indikator Kinerja. Yang secara terperinci tingkat capaian setiap sasaran adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2012	2013	2014
1	Terwujudnya Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	1	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (kriteria)	WTP	WTP	WTP
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1	Presentase SKPD, unit pelayanan dan satuan pendidikan yang menyusun SPP	2,67	4,10	7,55
		2	Presentase SKPD, unit pelayanan dan satuan pendidikan yang telah memiliki SOP	1,24	2,48	4,9
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	1	Hasil evaluasi LKjIP	CC	C	-

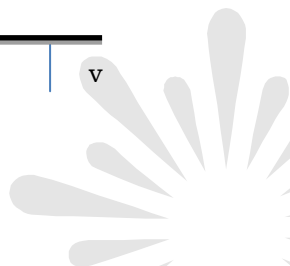
	aparatur.					
		2	Out put rencana kinerja	92,03	92,94	99,36
		3	Penyerapan anggaran	94,65 %	85,14 %	77,33
4	Meningkatnya disiplin pegawai	1	Pegawai yang melakukan indisipliner	28	20	35
5	meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	B	B	B

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2014-2015 dapat disimpulkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menunjukan perubahan kearah perbaikan.

Dalam rangka pencapaian sasaran Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung, pada Tahun 2014 telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan. Namun demikian di tahun 2014-2015 belum didukung dengan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, sehingga pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan belum tercapai dengan maksimal.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Temanggung	2
Gambar 1.2	Sistem Informasi Kepegawaian	10
Gambar 1.3	Penilaian PMPRB	13
Gambar 2.1	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	24
Gambar 2.2	Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.....	24
Gambar 2.3	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah.....	25
Gambar 3.1	Pelatihan rice transplanter	33
Gambar 3.2	Peresmian Lumbung Pangan	34
Gambar 3.3	Kondisi pelayanan pada KP3M	35
Gambar 3.4	AITIS	36
Gambar 3.5	Stan kopi Temanggung	39
Gambar 3.6	Wisata Posong.....	41
Gambar 3.7	Wisata Pikatan Water Park	42
Gambar 3.8	Job Fair Temanggung	45
Gambar 3.9	Pemberian Bantuan Disabilitas	48
Gambar 3.10	Survei RTLH	49
Gambar 3.11	Operasi Galian C.....	55
Gambar 3.12	Pembangunan Jalan dan komplek Perkantoran	57
Gambar 3.13	Peresmian Jembatan Sigandul	61
Gambar 3.14	Penerimaan Adipura Buana	65
Gambar 3.15	Kegiatan Belajar Kejar Paket C.....	69
Gambar 3.16	Gedung Kantor Arpusdok Kab. Temanggung	71
Gambar 3.17	Peresmian kampung KB	77
Gambar 3.18	Gedung RSUD Kab. Temanggung	79
Gambar 3.19	Skoring EKPPD	82
Gambar 3.20	Penyerahan Opini WTP	85
Gambar 3.21	Sistem Informasi Data Terpadu	88
Gambar 3.22	Topologi Jaringan Internet	92
Gambar 3.23	Web PPID Kab. Temanggung.....	93



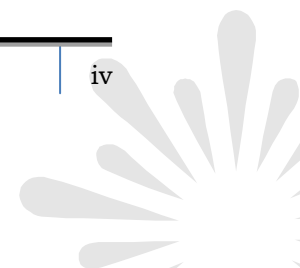
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Batas Wilayah Kabupaten Temanggung	2
Tabel 1.2	Tabel Pembagian Wilayah dan Kemiringan Lahan	3
Tabel 1.3	Kepadatan penduduk	4
Tabel 1.4	Perkembangan PDRB	5
Tabel 1.5	Profil PNS.....	9
Tabel 1.6	Jumlah PNS	10
Tabel 1.7	Jumlah PNS per golongan.....	11
Tabel 1.8	Jumlah Pejabat Eselon	11
Tabel 1.9	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 2.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	18
Tabel 2.3	Perjanjian kinerja Tahun 2016	20
Tabel 3.1	Pencapaian Sasaran dan Indikator	27
Tabel 3.2	Pencapaian Misi	28
Tabel 3.3	Skala Pengukuran Kinerja	29
Tabel 3.4	Pencapaian Misi 1	29
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran 1	30
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran 2	31
Tabel 3.7	Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Perkapita	32
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran 3	35
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran 4	37
Tabel 3.10	Pertumbuhan Ekonomi	38
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran 5	40
Tabel 3.12	Perkembangan Wisatawan	40
Tabel 3.13	Pencapaian Misi 2	43
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran 6	43
Tabel 3.15	Jumlah Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan	44
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran 7	45
Tabel 3.17	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Jawa Tengah	46
Tabel 3.18	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%)	47
Tabel 3.19	Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung	51
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran 8	52
Tabel 3.21	Pencapaian Misi 3	56

Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran 9	57
Tabel 3.23	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Temanggung Tahun 2016	58
Tabel 3.24	Daftar Bencana yang Terjadi dan Ditangani	59
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Sasaran 10	62
Tabel 3.26	Daftar Taman Kota Kabupaten Temanggung	63
Tabel 3.27	Kasus Pencemaran Lingkungan dan Plasma Nufah	63
Tabel 3.28	Pencapaian Misi 4	66
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Sasaran 11	66
Tabel 3.30	Rata-rata Lama Sekolah	68
Tabel 3.31	Pencapaian Misi 5	72
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Sasaran 12	73
Tabel 3.33	Realisasi Terhadap Target Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup.....	74
Tabel 3.34	Realisasi Terhadap Target Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	74
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran 13	76
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Sasaran 14	78
Tabel 3.37	Jumlah Pasien yang Dilayani Menggunakan JKT	78
Tabel 3.38	Pencapaian Misi 6	80
Tabel 3.39	Capaian Kinerja Sasaran 15	81
Tabel 3.40	Capaian Kinerja Sasaran 16	84
Tabel 3.41	Capaian Kinerja Sasaran 17	85
Tabel 3.42	Capaian Kinerja Sasaran 18	87
Tabel 3.43	Aplikasi e government	88
Tabel 3.44	Anggaran dan belanja	94

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN REVIEW	
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Daerah.....	1
B. Aspek Strategis	2
C. Gambaran Umum Organisasi	6
D. Kepegawaian	9
E. Capaian Reformasi Birokrasi	12
F. Isu Strategis	13
G. Sistematika Penyusunan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Indikator Kinerja Utama	18
C. Rencana Kinerja Tahunan	20
D. Perjanjian Kinerja	20
E. Instrumen pendukung Pengukuran Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016	29
A. Pengukuran Kinerja	26
B. Capaian Kinerja	29
C. Realisasi Anggaran	94
BAB IV PENUTUP	97
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Bupati 2016	
Pengukuran Kinerja 2016	
Realisasi APBD	
Prestasi	
Rencana Kinerja Tahun 2018	



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 dengan baik dan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Kinerja untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 merupakan tahun ke tiga media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Clean Governmen dan Good Governnace. Peningkatan akuntabilitas menuntut kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government), sehingga pelaporan kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja daerah yang telah terukur dengan target tahun 2016 sebagaimana telah di reviu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014.

Secara umum laporan kinerja tahun 2016 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam manajemen kinerja dan keuangan. Akhirnya atas segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Temanggung, 2017
BUPATI TEMANGGUNG

Drs. H. M. BAMBANG SUKARNO

Ikhtisar Eksekutif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dan dapat diujikan.

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator - indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Dalam Peraturan Daerah tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 6 Misi, 18 sasaran dan 29 indikator kinerja.

Berdasarkan saran/arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Hasil desk LKjIP) bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Temanggung dapat diringkas dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga sasaran yang semula berjumlah 67 sasaran menjadi 21 sasaran dan indikator kinerja sasaran semula berjumlah 240 indikator kinerja sasaran menjadi 29 indikator kinerja sasaran (ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018. Mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2016, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 5 sasaran, dan 6 indikator kinerja:
 - ✓ Capaian indikator kinerja, sebanyak 1 indikator kinerja atau 16,6% kategori sangat baik sekali (sudah terlaksana di atas 90 %), 5 indikator kinerja atau 83,4 % kategori memuaskan (diatas 100%).
 - ✓ Capaian sasaran pada misi I kategori memuaskan atau 109,7%

- Misi II terdapat 3 sasaran, dan 3 indikator kinerja:
 - ✓ Capaian indikator kinerja, sebanyak 3 indikator kinerja atau 100% kategori sangat memuaskan (diatas 100%).
 - ✓ Capaian sasaran pada misi II kategori memuaskan atau 138,6 %
- Misi III terdapat 2 sasaran, dan 4 indikator kinerja:
 - ✓ Capaian indikator kinerja, sebanyak 2 indikator kinerja atau 50% kategori sangat baik dan 2 indikator kinerja atau 50% kategori memuaskan (diatas 100%)
 - ✓ Capaian sasaran pada misi III kategori memuaskan atau 107%
- Misi IV terdapat 1 sasaran, dan 2 indikator kinerja:
 - ✓ Capaian indikator kinerja, sebanyak 2 indikator kinerja atau 100% kategori sangat baik (sudah terlaksana di atas 90%), dari misi IV atau bidang pendidikan perlu upaya keras untuk mengejar target yang belum tercapai. Sehingga diharapkan di tahun 2018 semua target yang telah ada di RPJMD bisa terlaksana.
 - ✓ Capaian sasaran pada misi IV kategori sangat baik atau 95,6%
- Misi V terdapat 3 sasaran, dan 8 indikator kinerja:
 - ✓ Capaian indikator kinerja, sebanyak 2 indikator kinerja atau 25% kategori sangat baik, 5 indikator kinerja atau 62,5 % kategori memuaskan (diatas 100%) dan 1 indikator kinerja atau 12,5 % kategori kurang (dibawah 50%)
 - ✓ Capaian sasaran pada misi V kategori sangat baik atau 96,83%
- Misi VI terdapat 4 sasaran, dan 6 indikator kinerja:
 - ✓ Capaian indikator kinerja, sebanyak 5 indikator kinerja atau 83,3% kategori sangat baik, dan 1 indikator kinerja atau 16,6 % kategori baik (sudah dilaksanakan di atas 70 %)
 - ✓ Capaian sasaran pada misi VI kategori sangat baik atau 98,1%

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian terhadap 18 sasaran yang mencakup 29 indikator kinerja, diketahui bahwa 10 sasaran atau 55,5 % memuaskan, 7 indikator kinerja atau 38,8 % sangat baik, 1 indikator kinerja atau 5,5% baik. Rata-rata realisasi capaian sasaran mencapai 107,6 % atau bermakna memuaskan. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 memuaskan.